EDISI 75 / 2023

EDUKASI KEUANGAN

HUT KE-48 BPPK

Transformasi menuju BPPK yang Semakin Sehat dan Selalu Hadir

Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris BPPK

PEMIMPIN REDAKSI
Iwan Khrisnawan

REDAKTUR
Chobin Martanto
Mia Prasetyawati
Sri Suryanovi
Lova Adlina Riyanatika
Adfuadi
Rita Dwi Lindawati
Irham Muammar Khalid Harahap
Rio Suareski
Jamila Lestyowati
Astrid Carera Imanuela
Yuniyati Syarifah
Bambang Kismanto
Andita Trias Nur Azizah
Zahar Angga Setiawan
Irawan Purwo Aji
Leliantika Handitya Deastri
Lestari Dwi Pribadi
Achmat Subekan
Gunawan
Trisni Syamsu Indyaputri
Primandita Fitriandi
Sukma Mayangsari

EDITOR
Arimbi Putri
Klemens Amy Novianto
Puspa Paradisa Puteri H

DESAIN GRAFIS
Ivan Rizki Arviandi
Fadhilah Maghfirah R
Septia Nur Muflikha

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata.
Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id.
Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

ALAMAT REDAKSI
Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7204131
Fax: +62 21 7261775
http://www.bppk.kemenkeu.go.id

DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
LIPUTAN KHUSUS	12
PROFIL	15
SERAMBI ILMU	19
KOMUNITAS	28
TAHUKAH KAMU	31
CERITA ALUMNI	34
TIPS & TRIK	40
KESEHATAN	43
POINT OF INTEREST	46
RESENSI	50
GALERI	52

SALAM REDAKSI

Pertambahan usia pada insan manusia juga berarti berkurangnya sisa hidup manusia di dunia. Namun tidak demikian dengan suatu negara atau organisasi. Pertambahan usia merupakan suatu bukti bahwa institusi tersebut berhasil mempertahankan eksistensi dan kinerjanya dari tahun ke tahun. Maka dari itu, pertambahan usia pada negara atau instansi sering dirayakan dengan ucapan "dirgahayu", kata serapan dari bahasa Sansekerta yang berarti berumur panjang.

Hampir setengah abad dilalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang jatuh pada medio April tahun 2023 ini, dirayakan bukan dengan gegap gempita, melainkan dengan semarak penyebaran pengetahuan. Atmosfer perayaan hari jadi ke-48 BPPK dapat Anda rasakan pada eksposisi Liputan Utama Majalah Edukasi Keuangan edisi ke-75 ini.

Selama 48 tahun lamanya, BPPK terus konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola pendidikan dan pelatihan para penggawa keuangan negara. Salah satu dari kegiatan tersebut adalah pelatihan untuk memperkuat komitmen implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK), yang ulasan lengkapnya dapat Anda simak pada rubrik Liputan Khusus.

BPPK mampu bertahan hingga keenam windunya ini salah satunya karena SDM-nya yang menjadi kekuatan terbesar. Sosok nakhoda baru dalam dua tahun terakhir pada Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK), Heru Wibowo, akan mengisi relung informasi Anda dalam rubrik Profil.

Komitmen BPPK dalam mengedukasi insan-insan Kemenkeu dan publik secara umum juga tercermin dalam Majalah Edukasi Keuangan, setiap rubriknya kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang penuh makna dan cerita. Rubrik resensi pada edisi kali ini membahas buku terkait pengomposan yang merupakan salah satu langkah hijau untuk bumi yang lebih baik.

Tak ketinggalan rubrik-rubrik dengan ulasan santai untuk kian mewarnai peringatan hari ulang tahun BPPK 2023, jalan-jalan menyusuri Kota Malang dan Magelang, tentunya sangat sayang jika dilewatkan. Terus perkaya informasi Anda dengan literasi, dan tak lengkap rasanya jika tidak mengucapkan kata pamungkas untuk peringatan hari ulang tahun institusi. Dirgahayu BPPK!

LINTAS PERISTIWA

Februari — Maret

TEKS:
PUSPA PARADISA PUTERI H.
FOTO:
DOKUMENTASI BPPK

BPPK TERIMA KUNJUNGAN BENCHMARK DARI PUSDIKLAT APARATUR PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam rangka mempelajari *repository* pengetahuan melalui *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS), Pusdiklat Aparatur Perdagangan Kementerian Perdagangan melakukan kunjungan ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada Rabu, 1 Februari 2023.

Sekretaris BPPK, Iqbal Islami membuka sekaligus memaparkan sekilas gambaran umum mengenai implementasi LMS dan KMS yang telah dikelola oleh BPPK. Kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Subbagian Komunikasi Publik Sekretariat BPPK, Chobin Martanto ini berjalan dengan lancar diiringi berbagai diskusi interaktif antara peserta dan narasumber. Usai melakukan diskusi dan tanya jawab, acara kunjungan ditutup dengan pertukaran plakat oleh kedua belah pihak.

BPPK MELUNCURKAN BUKU BIOGRAFI PROFESIONAL SUMIYATI PADA KEGIATAN LOKER-X PERDANA

Pada kegiatan LOKeR-X yang secara perdana dilangsungkan hari Jumat, 10 Februari 2023 berlokasi di Gedung N PKN STAN, BPPK secara resmi meluncurkan Buku Biografi Profesional Sumiyati: Srikandi Perubahan, Inspirasi Bagi Perempuan.

Sekretaris BPPK, Iqbal Islami mewakili Kepala BPPK membuka acara dengan memberikan *keynote speech* sekaligus memimpin peluncuran buku. Kegiatan dilanjutkan dengan rangkaian *talkshow* bersama Ibu Sumiyati dan Bapak Robert Adhi Ksp selaku penulis buku. *Talkshow* yang dimoderatori oleh Direktur PKN STAN, Rahmadi Murwanto membahas tentang perjalanan hidup Ibu Sumiyati hingga kisahnya dapat dinikmati dalam bentuk biografi.

BPPK TERIMA KUNJUNGAN BENCHMARK DARI BPSDM PROVINSI GORONTALO

Pada hari Jumat, 24 Februari 2023 BPPK menerima kunjungan *benchmark* dalam rangka kolaborasi pengembangan kompetensi ASN dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo yang berlokasi di Ruang Rapat F1 Sekretariat BPPK.

Kepala BPPK, Andin Hadiyanto memberikan sambutan serta menerangkan secara umum terkait tugas dan fungsi BPPK dalam mendukung pengembangan kompetensi SDM Pengelola Keuangan Negara di Indonesia.

Selanjutnya, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BPPK, Ganti Lis Ariyadi memberi penjelasan tentang layanan pembelajaran yang diberikan BPPK untuk Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (KLDI). Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, dan Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial yang memaparkan berbagai program di masing-masing Pusdiklat yang dapat dikerjasamakan dengan BPSDM Provinsi Gorontalo.

KEPALA BPPK HADIRI RAPAT KOMITE DAN KONFERENSI PERS IMPLEMENTASI DAN PENYAMPAIAN ASSETS & LIABILITIES COMMITTEE (ALCO) REGIONAL SULAWESI UTARA

Kepala BPPK, Andin Hadiyanto pada hari Selasa, 28 Februari 2023 menghadiri Rapat Komite dan Konferensi Pers Implementasi dan Penyampaian *Assets & Liabilities Committee* (ALCo) Regional Sulawesi Utara yang berlokasi di Aula Lantai 6 Gedung Keuangan Negara Manado. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan arahan substansi ALCo Pusat.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Direktur Pelaksana Anggaran, Tri Budhianto menghadirkan narasumber yakni *local expert* Prof. DR. Anderson Guntur Kumenaung, SE.,M.Si serta seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Utara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Turut hadir pula Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Negara, Bambang Juli Istanto.

KICK OFF HARI ULANG TAHUN BPPK KE-48

Menyongsong peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke-48, BPPK menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan yang ditandai dengan *Kick Off* Peringatan HUT ke-48 BPPK pada hari Kamis, 9 Maret 2023 bertempat di Aula Lantai 5 Gedung B Sekretariat BPPK. Tema yang diusung dalam peringatan kali ini yaitu "Transformasi menuju BPPK yang Semakin Sehat dan Selalu Hadir."

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala BPPK, Andin Hadiyanto dengan pemberian *opening speech* serta penyampaian rasa terima kasih kepada para pimpinan BPPK terdahulu dan seluruh pegawai BPPK. Kegiatan dilanjutkan dengan *talkshow* bersama pejabat Eselon I dan II BPPK yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Ganti Lis Ariyadi.

PKN STAN RESMI MENGUMUMKAN PEMBUKAAN SPMB PKN STAN TAHUN 2023

Pada Jumat, 31 Maret 2023 Politeknik Keuangan Negara STAN secara resmi mengeluarkan pengumuman Direktur PKN STAN nomor PENG-32/PKN/2023 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Program Studi Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2023. Dalam pengumuman tersebut, disampaikan jumlah total formasi penerimaan tahun 2023 sebanyak 1.100 orang dengan rincian program reguler 940 orang, program afirmasi kewilayahan 100 orang, dan program pembibitan 60 orang.

PUSPA PARADISA PUTERI H.

Enam Windu BPPK Hadir Untuk Insan Kemenkeu

Tanggal 16 April 2023 merupakan momen istimewa bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Genap 48 tahun sudah instansi ini berkiprah memfasilitasi pendidikan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tanggal tersebut, tepatnya pada tanggal 16 April 1975, merupakan awal lahirnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang waktu itu bernama Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK).

PERJALANAN BPPK SEBAGAI INSTITUSI PEMBELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENKEU

Sebelum terbentuknya BPLK, pendidikan dan pelatihan untuk pegawai Kementerian Keuangan ditangani langsung oleh masing-masing Direktorat Jenderal. Pada waktu itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan tergolong menjadi dua berdasar pelaksanaannya, yaitu pendidikan jangka panjang dan pendidikan jangka pendek.

Untuk pendidikan jangka panjang terdapat delapan jenis, yakni Akademi Pajak dan Pabean (AP2), Kursus Thesauri Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara (STIKN), Akademi Thesauri Negara (ATN), Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan (ADPK), Pendidikan Tenaga Akuntan, Akademi Perbendaharaan Negara (APBN), dan Institut Ilmu Keuangan.

Sedangkan untuk pendidikan jangka pendek terdapat lima jenis yang terdiri dari Pendidikan dan Latihan di Direktorat Jenderal Anggaran, Pendidikan dan Latihan di Direktorat Jenderal Pajak, Pendidikan dan Latihan di Direktorat Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah), Pendidikan dan Latihan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Pendidikan dan Latihan di Bidang Pengawasan Keuangan Negara.

Barulah kemudian Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen yang diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 405/MK/6/4/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan yang berlaku sejak tanggal 16 April 1975. Tanggal penetapan keputusan inilah yang menjadi tanggal kelahiran BPLK. Dengan terbentuknya BPLK, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai Kementerian Keuangan yang semula ditangani oleh masing-masing Direktorat Jenderal kemudian dialihkan kepada BPLK.

Berdasarkan keputusan tersebut, susunan organisasi BPLK kemudian terdiri atas Sekretariat Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, Pusdiklat Kebendaharaan Umum, Pusdiklat Perpajakan, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Pengawasan, Pusdiklat Ipeda dan Pegadaian; dan Pusdiklat Akuntansi Negara atau disebut juga Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Dalam perjalanannya, BPLK mengalami beberapa kali perubahan organisasi untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada dan tuntutan yang dihadapi. Pada tahun 2001, terjadi perubahan pada organisasi BPLK dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Keuangan. Nama BPLK berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dengan susunan organisasi terdiri atas Sekretariat Badan, Pusdiklat Pegawai, Pusdiklat Anggaran, Pusdiklat Perpajakan, Pusdiklat Bea dan Cukai dan Pusdiklat Keuangan Umum. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) secara *status quo* tetap berada di BPPK tetapi harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya kembali terjadi perubahan organisasi BPPK dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Susunan organisasi BPPK terdiri dari Sekretariat Badan, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Keuangan Umum dan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. STAN secara *status quo* tetap berada di BPPK dan harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelahnya masih ada beberapa kali perubahan. Namun, perubahan terakhir pada organisasi BPPK terjadi pada masa pandemi tahun 2021 dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Susunan organisasi BPPK terbaru berdasarkan peraturan tersebut yakni:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial;
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan;
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.

Politeknik Keuangan Negara STAN masih tetap berada di BPPK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN.

PERINGATAN HUT KE-48 BPPK

Pada tahun 2023, BPPK menyelenggarakan peringatan hari ulang tahun ke-48 dengan mengusung tema "Transformasi menuju BPPK yang Semakin Sehat dan Selalu Hadir". Adanya peringatan ini bertujuan untuk menguatkan *employee engagement* melalui kegiatan olahraga dan seni, meningkatkan *employee happiness*, dan menjadi sarana *fun learning* bagi pegawai.

Sama seperti perayaan tahun lalu, kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun BPPK ini diselenggarakan secara *hybrid*, yakni *online* dan *offline*. Meski demikian ada yang sedikit berbeda. Mengingat telah dicabutnya status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia oleh Presiden Joko Widodo maka kegiatan yang diadakan sebagian besar dilaksanakan secara *offline*. Namun, dapat dipastikan bahwa kegiatan perayaan berlangsung aman karena hampir seluruh pegawai telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis booster ke-2. Selain itu, pegawai yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan dibatasi hanya panitia, peserta, serta beberapa perwakilan suporter.

Perayaan berlangsung sejak tanggal 2 Maret s.d. 14 April 2023 dengan berbagai lomba dan kegiatan yang terbagi dalam tiga kategori yaitu kegiatan perlombaan olahraga dan seni, bakti sosial, serta pembelajaran.

Dalam kategori perlombaan olahraga dan seni yang diselenggarakan dalam kurun waktu 2 Maret s.d. 6 April 2023 dengan peserta pegawai BPPK dan Kementerian Keuangan terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

No	Jenis Perlombaan	Tanggal Pelaksanaan	UIC
1.	Pertandingan Bola Voli	3 – 17 Maret 2023	Pusdiklat Bea dan Cukai
2.	Pertandingan Tenis Meja	3 – 17 Maret 2023	Sekretariat Badan
3.	Lomba Desain Kaos BPPK	2 Maret – 6 April 2023	Sekretariat Badan
4.	Lomba Desain Segaram PPNPN	2 Maret – 6 April 2023	Sekretariat Badan
5.	Lomba Yel-yel BPPK	2 Maret – 6 April 2023	Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
6.	Lomba BPPK Idol	2 – 17 Maret 2023	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
7.	Lomba Penulisan Cerita "Bangga BPPK"	2 Maret – 6 April 2023	Pusdiklat Pajak
8.	Lomba Foto Kreatif Implementasi *Eco Office*	2 Maret – 6 April 2023	Sekretariat Badan
9.	Lomba Konten IG dengan tema Pembelajaran Terintegrasi dan *Learning Organization*	2 Maret – 6 April 2023	Sekretariat Badan
10.	Lomba EkspektasiKU (EKSpose PEngetahuan Kemenkeu-mu: PinTAr & MenginspiraSI)	14 April 2023 (*Launching*)	Pusdiklat Keuangan Umum

Selanjutnya, dalam kategori bakti sosial yang diselenggarakan pada tanggal 3 Maret s.d. 6 April 2023 dan ditujukan terhadap seluruh satuan kerja di lingkungan BPPK terdapat beberapa kegiatan antara lain:

No	Jenis Perlombaan	Tanggal Pelaksanaan	UIC
1.	Pemberian Santunan ke Panti Asuhan/Fakir Miskin/UMKM/Warga Sekitar yang Membutuhkan/PPNPN	3 Maret – 6 April 2023	Sekretariat Badan
2.	Pelaksanaan Donor Darah	3 – 17 Maret 2023	Politeknik Keuangan Negara STAN
3.	Pelaksanaan Jumat Bersih di Lingkungan Sekitar Kantor	3 – 17 Maret 2023	Sekretariat Badan

Terakhir, dalam kategori pembelajaran yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret s.d. 14 April 2023 dengan peserta pegawai BPPK dan Kementerian Keuangan terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut:

No	Jenis Perlombaan	Tanggal Pelaksanaan	UIC
1.	LOKeR Spesial	10, 17, 24, 31 Maret 2023	Sekretariat Badan
2.	Ngopi Hitam Spesial	9, 16, 23, 30 Maret dan 6 April 2023	Pusdiklat Keuangan Umum
3.	*Town Hall Meeting*	14 April 2023	Sekretariat Badan

Selain berbagai kegiatan tersebut, terdapat pula acara yang menandai dimulainya rangkaian perayaan hari ulang tahun BPPK yaitu Kick Off Peringatan HUT ke-48 BPPK yang berlangsung pada hari Kamis, 9 Maret 2023 di Aula Lantai 5 Gedung B Sekretariat Badan. Melalui kesempatan tersebut, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pegawai BPPK yang telah memberikan kontribusi untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan di Kementerian Keuangan maupun *stakeholders* lainnya. Kegiatan dilanjutkan dengan talk show bersama pejabat Eselon I dan II BPPK yang mengangkat tema "Refleksi 48 Tahun BPPK: Kunci Sukses Dulu, Kini, dan Nanti". Pada akhir acara, seluruh narasumber dan peserta yang hadir kompak menyerukan slogan BPPK "Naik Kelas, Naik Terus" dengan harapan dapat memberi semangat kepada seluruh insan BPPK untuk terus berkarya memberikan kontribusi terbaiknya dalam memajukan pendidikan di Kementerian Keuangan. Dirgahayu BPPK!

ARIMBI PUTRI

HUT ke-48 BPPK: Lebih dari Sekadar Pertambahan Usia

Peringatan hari ulang tahun kerap kali identik dengan perhelatan akbar, riuh ramai, dan gegap gempita suatu perayaan. Namun tidak halnya dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi mengelola pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara ini, memperingati hari jadinya sesuai dengan karakteristik khas instansinya yaitu di bidang pendidikan dan pembelajaran.

Selain berbagai perlombaan yang dilaksanakan untuk memeriahkan hari jadinya yang ke-48, BPPK menyelenggarakan kegiatan Learning Organization Knowledge Room (LOKeR) edisi spesial. LOKeR sejatinya memang sudah merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan BPPK setiap Jumat pukul 13.30. LOKeR merupakan wadah bagi para pemelajar untuk belajar dan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) kepada masyarakat umum. Khusus untuk peringatan hari ulang tahun BPPK ke-48, LOKeR diselenggarakan secara spesial selama empat kali setiap Jumat.

Keempat episode LOKeR Spesial ini adalah "Learn Better and Learning How to Learn" pada 10 Maret 2023 yang menghadirkan narasumber Sekretaris BPPK, Iqbal Islami; "Implementasi Budaya Kemenkeu untuk Lintas Generasi" pada 17 Maret 2023 dengan narasumber Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Subbagian Pembangunan Budaya Biro SDM, Suci Lestari; "Growth Mindset – Unlock Your Maximum Potentials!" pada 24 Maret 2023 dengan narasumber Widyaiswara Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, Herru Widiatmanti; dan "Bersatu Membangun Integritas" dengan narasumber dari Paksiapi Danarakca BPPK, Agus Suharsono dan Aniek Juliarini.

Episode pertama dari LOKeR Spesial ini langsung menghadirkan sosok pemelajar kenamaan BPPK, yakni Sekretaris Badan, Iqbal Islami. Lulusan Case Western University Ohio ini membahas bagaimana cara belajar yang baik dan benar menurut penulis buku Learn Better, Ulrich Boser, agar mampu memaksimalkan kapasitas diri. Menurut Ulrich Boser, sebagaimana disampaikan Iqbal, individu belajar harus dilakukan secara berulang-ulang dengan didampingi oleh pelatih atau mentor untuk memberikan masukan (*feedback*). Dengan pengulangan yang terus menerus, seseorang akan mampu mencapai level master dengan menciptakan yang dinamakan *neural pathway* pada otak. *Neural pathway* memungkinkan terbukanya "jalur" pada otak untuk mengingat setiap detail pembelajaran hingga kita mampu melakukannya di luar ingatan.

"Dalam bekerja juga begitu, kalau kita sudah matang, hanya dengan melihat saja sudah bisa tahu harus diapakan. Mengulang-ulang itu bagus, tapi akan lebih baik jika ditambah dengan target, *skill* mana yang mau kita asah," ungkap Iqbal.

Dari kemampuan bekerja melalui belajar, pegawai juga diperkaya dengan budaya organisasi yang telah diinternalisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada LOKeR Spesial episode selanjutnya yakni episode 66 "Implementasi Budaya Kemenkeu untuk Lintas Generasi". Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa Kemenkeu merupakan organisasi yang sangat besar, dengan sumber daya manusianya yang lebih dari 80 ribu orang. Dari jumlah yang sangat besar tersebut, tentunya tidak berasal dari satu kohort atau kelompok usia saja, melainkan bervariasi dari *baby boomers* hingga gen Z.

Dewasa ini perbedaan generasi menjadi salah satu perhatian yang cukup besar karena memengaruhi cara bekerja dan berkomunikasi dalam organisasi. Hal ini tentunya juga akan memengaruhi bagaimana organisasi akan mencapai tujuannya. BPPK dalam hal ini perlu menentukan bagaimana mewujudkan tujuannya sebagai organisasi yang sehat dan selalu hadir, sebagaimana tema pada hari jadinya tahun ini.

Budaya sendiri merupakan nilai-nilai yang diyakini bersama dan menjadi suatu kebiasaan. Dengan adanya budaya organisasi khususnya Kemenkeu, diharapkan para pegawai memiliki *value* (nilai), atau karakter yang sama. Untuk menyamakan nilai-nilai dan karakter tersebut, dilakukan lah sejumlah strategi, di antaranya melalui *legal substance* (peraturan), dan *core values*.

"Salah satunya melalui penerapan *activity-based workplace* (ABW). Jadi ruangan kerja bersama membuat lingkungan kerja sesuai dengan aktivitas kita. Sehingga ekosistemnya sangat mendukung pekerjaan sehari-hari," urai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Subbagian Pembangunan Budaya Biro SDM, Suci Lestari.

Selain itu, budaya tersebut juga diperkuat dengan integrasi data. Hal ini diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin masif. Integrasi data salah satunya dilakukan melalui budaya kolaboratif, sebab saat ini sudah tidak bisa lagi pekerjaan hanya dilakukan sebagai upaya segelintir individu atau kelompok.

"Ibarat kita bikin *layer*, penguatan budaya ini adalah *barrier* pertama yang bisa mencegah adanya potensi pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin," tambah Suci.

Salah satunya penerapan hidup sederhana. Menerapkan tidak berlebih-lebihan dan menerapkan prinsip kepatutan serta empati kepada masyarakat.

"lihatlah di orang-orang sekitar dia. Tidak hanya teman-temannya, tapi lingkup

di mana dia berada. Sewajarnya saja," ungkapnya.

KEMBANGKAN DIRI DENGAN KELOLA CARA BERPIKIR

Kemampuan belajar bisa didapatkan dari mana pun dan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengembangkan cara berpikir *growth mindset*. *Growth mindset* merupakan cara berpikir di mana seseorang percaya bahwa kemampuan dan potensi seseorang dapat berkembang melalui upaya dan latihan, bukan merupakan kualitas bawaan yang tetap. *Growth mindset* ini adalah oposisi dari *fixed mindset* yaitu cara berpikir yang kaku, terbatas, dan tetap yang menganggap sesuatu tidak dapat diubah.

Melalui pengembangan pola pikir *growth mindset*, suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dalam suatu organisasi, kedua belah pihak baik manajerial maupun pelaksana penting untuk memahami *growth mindset* ini. Untuk dapat memiliki pola pikir *growth mindset*, kita dapat melakukan beberapa hal. Pertama, hindari penggunaan kata-kata negatif seperti tidak bisa, sudah terlambat, dan lain-lain. Kedua, jangan takut untuk gagal. Ketiga, cari umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan. Keempat, kelola keraguan dan ketakutan. Kelima, fokus pada proses bukan hasil, sehingga meminimalisasi ketakutan akan kegagalan. Terakhir adalah berlatih dan belajar secara konsisten.

"Setiap orang pasti ada rasa takut, ragu, gamang, ketika mencoba sesuatu yang baru atau dicemplungkan di lingkungan yang baru. Tapi bagaimana bahwa ketakutan itu adalah proses belajar kita, jangan dibiarkan untuk menghambat proses belajar," ujar Widyaiswara Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial, Herru Widiatmanti yang menjadi narasumber pada LOKeR Spesial "Growth Mindset - Unlock Your Maximum Potentials!".

Kemampuan belajar yang ada tentunya tidak akan berarti apa-apa bagi organisasi jika seorang pegawai tidak memiliki integritas dalam bekerja. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki kecakapan tidak hanya belajar tetapi juga sikap dan perilaku yang juga tercantum dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan yang salah satunya adalah integritas. Guna memperkuat integritas para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, rangkaian terakhir dari LOKeR Spesial HUT BPPK ke-48 ini diisi dengan topik "Bersatu Membangun Integritas". Dengan tema tersebut, diharapkan para Sobat Pemelajar (sapaan audiens LOKeR) dapat meningkatkan kapasitas diri sekaligus menjadi wujud nyata dari BPPK untuk selalu hadir memberikan materi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya insan Kemenkeu. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari pegawai Kemenkeu diharapkan senantiasa memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

"Perilaku utama dari integritas itu adalah bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Serta menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela," ungkap Agus Suharsono yang akrab dipanggil Gus Har sebagai narasumber pada LOKeR Spesial kali ini.

Integritas juga erat kaitannya dengan kerja keras, ikhlas, cerdas, dan tuntas. Keempat elemen tersebut saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kerja cerdas, ujar Gus Har, salah satunya merupakan penerapan *learning organization*.

"Bagaimana kita bisa kerja cerdas? *Knowledge capture tacit knowledge* (merekam pengetahuan implisit) masing-masing orang. Kalau kerja tuntas, tuntaskan pekerjaan kita sebelum beralih ke pekerjaan lainnya," tambahnya.

Dengan keseluruhan rangkaian LOKeR Spesial Hari Ulang Tahun ke-48 BPPK ini, diharapkan BPPK mampu menjadi representasi instansi yang selalu hadir untuk pemenuhan kebutuhan pengetahuan, baik di lingkungan BPPK, Kementerian Keuangan, atau lebih luas kepada masyarakat umum. Sebab dengan pengetahuan lah masyarakat mampu beradab dan berkembang, maka di hari jadi BPPK ini, BPPK lebih dari sekadar merayakan ulang tahunnya sendiri, melainkan menyemarakkan semangat pengetahuan bersama.

"Dalam bekerja juga begitu, kalau kita sudah matang, hanya dengan melihat saja sudah bisa tahu harus diapakan. Mengulang-ulang itu bagus, tapi akan lebih baik jika ditambah dengan target, skill mana yang mau kita asah"

ACHMAT SUBEKAN, LESTARI DWI PRIBADI, DAN GUNAWAN
PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

PENGUATAN KOMITMEN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) UNTUK MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) YANG ANDAL

MENGENAL PIPK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai. Adapun manfaat penerapan PIPK antara lain adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasi, meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan, meningkatnya keandalan laporan keuangan, terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, dan meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

LEBIH JAUH TENTANG PELAKSANAAN PIPK

PIPK dimaknai sebagai pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). *Andal* sendiri diartikan sebagai informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Pengendalian intern juga merupakan implementasi dari *three lines models* sebagai penyempurnaan dari *three line of defense* yang menyatakan bahwa PIPK dilaksanakan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Penerapan PIPK harus dilaksanakan baik pada tingkat entitas maupun transaksi. Pada pelaksanaannya, PIPK sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia terutama pada penerap, penilai, dan periviu laporan keuangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP) tahun 2021 dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun 2021, LKPP Tahun 2021 kembali mendapatkan opini *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP). Di samping opini atas LKPP, LHP dimaksud juga menyampaikan opini WTP untuk Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 83 Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL). Sementara itu, empat Kementerian/Lembaga lainnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Capaian sebanyak 83 Kementerian/ Lembaga mendapatkan opini WTP merupakan prestasi yang menggembirakan. Meskipun demikian, masih terdapat 27 temuan terkait pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan terkait pengendalian intern tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah agar tidak terjadi temuan berulang di tahun-tahun berikutnya. Salah satu tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah melakukan penguatan implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

DUKUNGAN PUSDIKLAT AP UNTUK PENGUATAN KOMITMEN IMPLEMENTASI PIPK

Semangat kolaborasi *Kemenkeu SATU* senantiasa menginspirasi unit-unit organisasi di Kementerian Keuangan. Semangat ini menginspirasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan APBN, khususnya dalam hal menjaga kualitas laporan keuangan, baik LKPP maupun LKKL. Penguatan PIPK adalah salah satu kegiatan yang dilakukan guna mendukung dan menjaga kualitas laporan keuangan. Sebagai salah satu unit di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyusun suatu *program unggulan* yaitu Program Pembelajaran Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Program ini dirancang dengan menggunakan strategi *levelling* guna melibatkan peran dari semua lini, mulai dari level teknis (staf) sampai dengan level strategis (pimpinan). Semua pihak yang terlibat dalam proses pengendalian intern atas pelaporan keuangan menjadi sasaran Program Pembelajaran PIPK. Dengan memperhatikan strategi *levelling* tersebut, program ini diselenggarakan dalam tiga format, yaitu:

Seminar Eksekutif bagi level pemangku kebijakan;

E-learning sebagai diseminasi pemahaman secara masif bagi SDM pengelola keuangan pada seluruh Kementerian/ Lembaga; dan

Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Terintegrasi dan *Co-Creation of Learning* (CCL) bagi *key person* implementasi PIPK.

SEMINAR EKSEKUTIF PIPK

Format Pertama, sebagai pembuka rangkaian Program Pembelajaran PIPK adalah seminar eksekutif yang diselenggarakan pada hari Selasa, 24 Januari 2023. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium Gedung Nusantara Politeknik Keuangan Negara STAN yang dihadiri oleh 164 peserta utamanya adalah JPT Pratama yang berasal dari 61 Kementerian/ Lembaga. Seminar ini bertujuan untuk menyamakan persepsi semua pejabat terkait di Kementerian/Lembaga dalam membangun kesadaran dan komitmen penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Seminar Eksekutif PIPK dibuka oleh Wakil Menteri Keuangan dan dihadiri para pejabat baik dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian/

Gambar 1 Suasana Seminar Eksekutif PIPK

Gambar 2 Wakil Menteri Keuangan menyampaikan *keynote speech* dalam Seminar Eksekutif PIPK

Gambar 3 Para Pejabat mendampingi Wakil Menteri Keuangan pada sesi penguatan komitmen PIPK

Lembaga lainnya. Pada kesempatan ini, Kepala BPPK memberikan *welcoming speech* yang mengulas mengenai pentingnya komitmen implementasi PIPK dan peran strategis SDM Pengelola Keuangan dan APIP dalam mengelola PIPK sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan APBN pada umumnya. Sementara itu, *keynote speech* disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Prof Dr. Suahasil Nazara. Pada kesempatan tersebut Wakil Menteri Keuangan menyampaikan pesan bahwa akuntabilitas tidak boleh menjadi penghambat inovasi, dan inovasi tidak boleh meninggalkan akuntabilitas. Akuntabilitas dan inovasi harus berjalan beriringan dalam setiap *policy* yang diambil dalam pengelolaan keuangan negara.

Seminar dilaksanakan dalam dua sesi. Pembicara atau narasumber pada sesi pertama adalah Bapak Ahmad Ghufron, Inspektur VII, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Narasumber berikutnya pada sesi pertama adalah Bapak Winarno, Kepala Subauditorat AKN II.A Badan Pemeriksa Keuangan RI. Acara dipandu oleh Bapak Puji Agus, Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada sesi ini, para narasumber membahas tentang pentingnya implementasi PIPK untuk menjaga sustainabilitas dari akuntabilitas pengelolaan APBN, baik di lingkungan Kementerian/Lembaga maupun di lingkungan Kementerin Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan pengelola fiskal.

Sesi seminar berlanjut dengan sesi kedua yang dipandu oleh Bapak Setyawan Dwi Antoro, Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Narasumber pertama pada sesi kedua adalah Ibu Fahma Sari Fatma, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Sedangkan narasumber kedua adalah Bapak Bayu Teja Muliawan, Staf Ahli Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Pada sesi kedua ini, para narasumber memaparkan mengenai peran penting Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam PIPK. Selain itu, kompetensi aparatur dan efektivitas penerapan SPI menjadi hal penting untuk terus ditingkatkan sehingga mampu mencegah temuan berulang dalam LHP.

Seminar eksekutif telah berlangsung dengan sukses dan menjadi pembuka dari rangkaian Program Pembelajaran PIPK tahun 2023. Program Pembelajaran PIPK diharapkan mampu mewujudkan penguatan pemahaman implementasi PIPK serta meningkatkan kualitas dan opini audit atas laporan keuangan bagi semua Kementerian/Lembaga pengelola APBN.

PROGRAM E-LEARNING PIPK

Format kedua dalam program penguatan PIPK adalah Program *E-Learning* PIPK. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai PIPK kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berperan dalam *three lines model*. *E-Learning* PIPK dibagi menjadi lima program pembelajaran yaitu:

a. *E-Learning* Pengantar PIPK,
b. *E-Learning* Proses Bisnis Penerapan PIPK,
c. *E-Learning* Proses Bisnis Penilaian PIPK,
d. *E-Learning* Proses Bisnis Reviu PIPK,dan
e. *E-Learning* Matriks Risiko Pengendalian dalam Kerangka PIPK.

Kelima program di atas diikuti oleh peserta yang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga pengelola APBN.

PELATIHAN JARAK JAUH TERINTEGRASI DAN CO-CREATION OF LEARNING PIPK

Format ketiga, Program Pelatihan Jarak Jauh Terintegrasi dan *Co-creation of Learning* yang diperuntukkan bagi *key persons* penerap dan penilai PIPK, yang dilaksanakan dengan mengacu pada siklus pengendalian intern laporan keuangan.

Output yang diharapkan dari pelatihan adalah meningkatnya kualitas laporan keuangan satker Kementerian/Lembaga. Pembelajaran terstruktur diampu oleh fasilitator dari BPPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Sedangkan *learning from experience* diperoleh peserta dari penugasan *action learning* berupa penyusunan dokumen PIPK. Sementara itu, untuk *learning from others* dilaksanakan melalui pendampingan penyusunan dokumen PIPK oleh *coach* yang berasal dari BPPK dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dengan proses pembelajaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas output pembelajaran dan karakteristik pembelajaran yang semakin relevan, aplikatif, berdampak tinggi, dan mudah diakses.

COMMUNITY OF PRACTICE (COP)

Untuk menjaga kesinambungan pembelajaran, Kementerian Keuangan telah membentuk *Community of Practice* PELITA LOKA (Praktisi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan), yaitu suatu komunitas yang beranggotakan para praktisi PIPK. COP ini sampai saat ini terus berjalan dan bertambah jumlah anggotanya. Komunitas pembelajaran ini diharapkan dapat meng-*update* isu terkini di lingkungan pekerjaan para anggota. Komunitas juga menjadi media *sharing of knowledge* dan diskusi guna mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi. Dengan adanya *Community of Practice* PELITA LOKA ini, diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan yang berulang baik di satuan kerja yang sama maupun satuan kerja lain.

ARIMBI PUTRI

PROFIL KEPALA PUSDIKLAT KNPK
HERU WIBOWO: BEKERJA IKHLAS DENGAN MEMAKNAI ILMU DAN HIDUP

Perawakan tinggi dengan senyum ramah menyapa tim redaksi saat mengunjungi ruang Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK) BPPK. Ruangan dengan jendela-jendela besar menghadap ke Gedung A Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), membuat ruangan tersebut terlihat cerah dan terang dengan cahaya matahari langsung menembus memenuhi sudut-sudutnya. Ditambah, ruang yang pintunya selalu terbuka membuat suasana semakin hangat dan ramah menyambut siapa saja yang hadir di sana.

Ialah Heru Wibowo, Kepala Pusdiklat KNPK yang mulai menjabat pada dua tahun silam, tepatnya pada Februari 2021. Heru sengaja membiarkan pintu ruangan dan jendela ruangannya terbuka lebar. Ruangan-ruangan yang terbuka juga menjadi cerminan sifatnya yang terbuka bagi siapa saja.

"Di mana pun saya berada, jendela-jendela selalu saya buka, pintu tidak saya tutup. Biar siapa saja bisa masuk, atau kadang saya yang berkeliling bertemu dengan orang-orang di sekitar," ungkapnya.

Kesan terbuka dan luwes sangat kental terasa pada pribadi Heru. Laki laki asal Trenggalek, Jawa Timur ini berbincang dengan sangat cair walaupun dengan lintas jenjang dan generasi. Heru memang berprinsip untuk tidak memandang berbeda orang-orang di sekitarnya dan sangat menjunjung tinggi prinsip ilmu padi.

"Kita ini hanya masalah posisi, tapi begitu duduk kan sama, karena mutiara itu bisa ada di mana-mana. Orang di bawah perkataannya bisa emas semua, begitu juga sebaliknya. Justru ketika kedudukan semakin tinggi, tanggung jawab semakin besar, itu kita semakin rendah hati. Jangan pernah sombong, karena kehidupan itu berputar. Jadi saya menganggapnya semua kolega, tapi tanggung jawab tetap di saya," tegasnya.

Prinsip kehidupan dan perilakunya ini pun tidak lepas dari ajaran almarhum ayahnya. Bagi Heru, ayahnya adalah sosok panutan yang sangat ideal. Beliau semasa hidupnya merupakan orang yang mampu menempatkan diri dengan sangat baik, baik sebagai ayah maupun sebagai kepala rumah tangga. Ayahnya tidak pernah membedakan antara tugas ibu dan ayah, seluruhnya dikerjakan bersama-sama sehingga kebutuhan keluarga selalu terpenuhi tanpa harus menunggu satu sama lain. Tidak ada dikotomi gender dalam pekerjaan rumah tangga, dan seharusnya begitu pun dalam hal pekerjaan di organisasi. Meski demikian, tetap ada yang berperan sebagai pengambil keputusan atau pemimpinnya.

Di sisi lain, ayahanda Heru pun benar-benar menerapkan trias semboyan Ki Hajar Dewantara dalam mendidik anak-anaknya. Beliau mampu menjadi pemimpin dan sosok panutan (*ing ngarso sung tulodho*) bagi keempat anaknya. Ketika anak-anaknya telah beranjak remaja,

ayahnya hanya berperan sebagai sosok yang mendampingi tanpa mencampuri lebih jauh urusan anaknya dengan tetap berdiri di samping mereka.

"Bapak saya tahu kapan harus menyingkir dari kehidupan anak-anaknya. Tapi tetap berperan memberi nasehat dan konsultasi, ya *ing madyo mangun karso* dan *tut wuri handayani*," ujar sulung dari empat bersaudara itu.

PEMELAJAR SEJATI, KEJAR ILMU TANPA HENTI

Sejak duduk di bangku sekolah, Heru yang merupakan anak seorang guru dan penyuluh pertanian tersebut sudah menampakkan determinasinya di bidang akademis sehingga akhirnya mengantarkannya lulus seleksi penerimaan mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya, Malang. Namun, harapan untuk menjadi seorang tenaga medis akhirnya berujung menjadi seorang ekonom dengan memilih jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP).

"Awalnya memang hanya karena itu yang masih ada kuota, tapi ternyata setelah masuk saya suka karena mempelajari bagaimana ekonomi bekerja. Saya langsung *tune-in* dan malah jatuh cinta pada bidang tersebut," kenangnya.

Setelah beberapa waktu Heru menyadari ada *invisible hand* yang bekerja untuk masa depannya. Heru menyimpulkan, jika dirinya tidak mengambil jurusan studi pembangunan tersebut maka muskil baginya berada pada posisinya saat ini.

Lulus sarjana, Heru terbang ke ibukota untuk berkarir sebagai bankir. Hingga pada akhirnya Heru menjajal masuk Kementerian Keuangan melalui tes CPNS usai bank tempatnya bekerja terdampak krisis ekonomi pada 1998. Keputusan mendaftar tes CPNS tersebut merupakan yang pertama kalinya sekaligus yang terakhir karena Heru mendaftar pada batas maksimal usia yang menjadi persyaratan.

Berhasil menyisihkan puluhan ribu pesaing, Heru akhirnya dinyatakan lolos tes CPNS dan masuk Kemenkeu pada 1999. Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM – sekarang BKF), menjadi pelabuhan pertama Heru di Kemenkeu. Bidang keahliannya yang sangat sesuai dengan instansi tersebut menjadi salah satu pemulus perjalanan karir Heru.

Tak lama berselang, Heru berhasil mendapatkan beasiswa kuliah magister di International University of Japan, Jepang. Heru berhasil menamatkan pendidikannya di negara matahari terbit itu di tahun 2005. Meski demikian, banyak hal yang diperoleh Heru selain ilmu formal di sana. Di antaranya pelajaran yang dapat diambil dari budaya masyarakat Jepang yang sangat kuat dan kental, kesantunan warganya, kerja kerasnya, dan Heru juga

kerap berkesempatan bermain ski karena saljunya yang sangat tebal di daerahnya.

Sepulangnya dari Jepang, karir Heru pun meningkat hingga akhirnya menduduki jabatan administrator. Lagi-lagi jiwa Heru yang haus akan ilmu mengantarkannya kembali meraih beasiswa untuk studi doktoral di University of Western Australia pada tahun 2008. Saat itu, Heru mengoptimalkan waktunya untuk mengebut menyelesaikan disertasinya hingga selesai tepat waktu. Ia memilih segera pulang karena rindu nusantara dan merasa Tanah Air masih membutuhkan dirinya.

"Saya beranggapan bahwa di luar negeri itu sudah banyak orang pintar. Sedangkan kita masih butuh banyak orang pintar. Di sana juga kehidupan terlalu teratur, kurang ada kejutan," kelakarnya.

Untuk bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu dengan hasil yang terbaik, Heru memiliki prinsip "*follow the dragon*". Heru mengatakan, dirinya selalu mengikuti teman-teman Tiongkok - yang kerap diasosiasikan dengan naga (*dragon*) - ketika sedang belajar.

"Ketika temen-temen Tiongkok saya ada di meja kerjanya, saya harus ada di kampus juga. Etos kerja keras mereka luar biasa. Jadi yang begitu saya ikuti. Saya pulang kampus untuk jemput anak di *day care*, mengerjakan beberapa pekerjaan rumah, dan kemudian balik lagi ke kampus untuk belajar, mengikuti teman-teman Tiongkok saya itu," ujarnya.

Istirahat hanya 4-6 jam sehari sudah menjadi makanan sehari-harinya. Bapak dua anak ini pun mengaku ketika kuliah di Jepang lebih banyak menghabiskan waktu di kampus dibandingkan di *dormitory*-nya sendiri. Hal itu dilakukannya sekaligus agar dapat memanfaatkan waktu sebaik dan seefisien mungkin. Terbukti, di kedua studinya Heru berhasil lulus dengan tepat waktu. Impiannya dulu yang sempat gagal mengenyam kelas akselerasi ketika SMA menjadi penyemangat untuk dapat mengakselerasi pendidikan pascasarjananya.

TETAP MEMBUMI DAN MENGABDI UNTUK NEGERI

Salah satu pepatah populer mengatakan jika semakin tinggi pohon semakin kencang pula anginnya. Hal itu sejalan dengan realitas pekerjaan di mana jabatan yang tinggi akan terdapat banyak tantangan. Namun satu hal yang tetap menjadi pegangan Heru, yaitu untuk tetap *andhap asor* (*humility*). Semenjak kepergian sang ibunda, Heru meyakini bahwa hidup ini fana dan sangat rentan. Nasib seseorang bisa dengan mudah berputar dan berbalik arah.

"Meninggalnya ibu saya itu sangat mengguncang saya. Itu benar-benar mengubah pemikiran dan hidup saya. Mengubah *mindset* saya tentang kehidupan, bahwa kalau kita pergi sudah tidak ada lagi yang dipikirkan. Saat itu jam 7 malam ibu saya masih telepon, jam 10 malam tiba-tiba saya dikabari sudah enggak ada. Jadi ya memang enggak ada gunanya *jemawa*, hidup itu sangat *fragile* dan juga berputar," urainya.

Prinsip itu pula yang juga mendasari Heru dalam bekerja. Heru mengungkapkan, jangan pernah merasa menjadi langit tertinggi dan merasa cukup. Sebab semakin kita berusaha untuk semakin baik, kontribusi yang dihasilkan juga semakin signifikan. Terlebih, kontribusi yang diberikan itu untuk negara. Oleh sebab itu, Heru selalu mengupayakan untuk bisa berkontribusi kepada negara dengan lebih baik. Ia pun berharap bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang, dan khususnya kepada bangsa dan negara.

Mengimbangi semua itu, Heru menyatakan perlunya berprasangka baik dengan Sang Pencipta, karena manusia tidak akan mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Hal ini juga berlaku dalam keseharian bekerja. Kerja sesulit apapun, tambah Heru, harus tetap berprasangka baik kepada Tuhan dan ikhlas.

"Dalam bekerja itu *nothing to lose* saja, jangan melakukan sesuatu itu melihat pamrihnya. Yakinlah kalau kita kerjakan yang terbaik itu pasti akan ada yang melihat. Minimal Tuhan yang melihat," tutupnya.

"Justru ketika kedudukan semakin tinggi, tanggung jawab semakin besar, itu kita semakin rendah hati. Jangan pernah sombong, karena kehidupan itu berputar."

Serambi Ilmu

Puput Waryanto | MAMPUKAH #UANGKITA MENANGGULANGI SELURUH BENCANA DI NEGERI TERCINTA?

Muhammad Rifky Santoso | *CELAH BIAYA JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG*

PUPUT WARYANTO
SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN - PEGAWAI TUGAS BELAJAR DI UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAMPUKAH #UANGKITA MENANGGULANGI SELURUH BENCANA DI NEGERI TERCINTA?

Mungkin sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa penanggulangan bencana identik dengan penyediaan tenda pengungsian, mie instan, obat-obatan, perahu karet, dan pakaian. Ternyata, ini hanya bagian kecil dari penanggulangan bencana. Banyak hal lain yang justru membutuhkan biaya lebih besar dan butuh sumber yang besar pula. Artikel berikut ini akan memberikan penjelasan mengenai potensi biaya dan cara mengelolanya.

Bertubi-tubi kejadian berupa bencana di Indonesia sudah tidak bisa terhindarkan lagi. Sesuai hasil analisis Bank Dunia[1], Indonesia merupakan negara dengan peringkat ke-12 dari 35 negara yang menghadapi risiko bencana alam yang antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kekeringan, dan likuifaksi. Gempa sekaligus diikuti tsunami berpotensi terjadi karena secara geografis Indonesia dilalui oleh Cincin Api Pasifik. Kemarau panjang dan curah hujan yang tinggi bisa saja menjadi pemicu kekeringan dan banjir. Saat ini, Indonesia semakin kehilangan hutan karena perluasan pertanian dan perkotaan, yang mengakibatkan peningkatan aliran sungai, aliran permukaan, dan hasil air total serta penurunan resapan air tanah (Kayitesi et al., 2022)[2].

Bencana alam juga harus disadari dapat menimbulkan kerugian besar. Pada tahun 2018, bencana gempa bumi terjadi di Nusa Tenggara Barat berkekuatan 7,0 SR. Gempa bumi mengakibatkan 555 korban meninggal dunia dan 390.529 jiwa penduduk mengungsi. Kerugian mencapai Rp12,15 triliun. Pada tahun 2018, bencana juga terjadi di Sulawesi Tengah. Tidak hanya gempa bumi, tetapi juga diikuti tsunami yang menyebabkan kerugian sebesar Rp18,48 triliun. Korban meninggal mencapai 2.045 orang. Pada tahun 2022, gempa bumi yang berkekuatan 5,6 SR mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, sekitar 58 ribu rumah rusak dan 600 orang meninggal dunia. Kerugian ditaksir mencapai Rp4 triliun.

Bencana alam akan diprediksi lebih sering terjadi ke depan di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, terutama di tahun 2023 yang diperkirakan sebagai awal tahun resesi akibat perubahan iklim dan faktor lainnya. Meskipun Indonesia menanggung biaya tinggi akibat bencana setiap tahun, lonjakan pengeluaran akibat peristiwa bencana dapat jauh melebihi perkiraan. Hal ini bisa saja terjadi karena bencana besar bisa terjadi secara tiba-tiba, tanpa dapat diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika maupun Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Sebenarnya pemerintah telah menetapkan kebijakan agar pemulihan bencana bisa dilakukan dengan lebih cepat, tetapi realisasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Misalnya, terkait bencana di Sulawesi Tengah, meskipun pada awalnya telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya, ternyata proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak kunjung selesai sesuai target tahun 2020. Akhirnya, proses diperpanjang melalui Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2022.

[1] *https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/indonesia/vulnerability*

[2] *Kayitesi, N. M., Guzha, A. C., & Mariethoz, G. (2022). Impacts of Land use Land Cover Change and Climate Change on River Hydro-morphology-A review of research studies in tropical regions. Journal of Hydrology, 128702.*

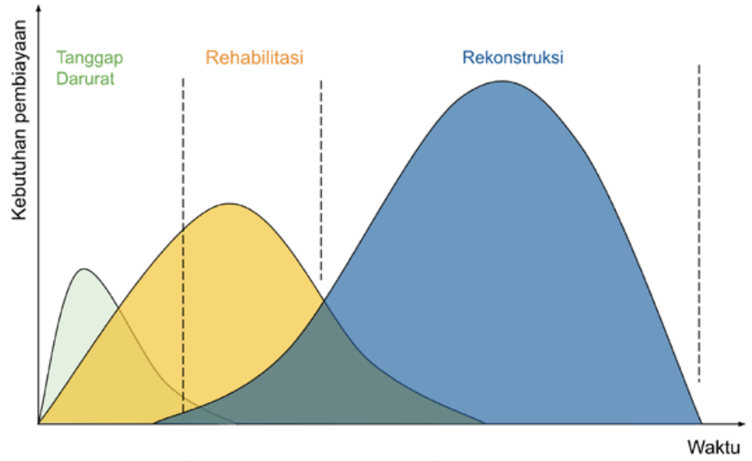

Gambar 1. Sifat Kebutuhan Pembiayaan Pascabencana
Sumber: Diolah dari Ghesquiere dan Mahul (2010)[3]

Lamanya proses pemulihan pascabencana, menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak semata-mata identik dengan tanggap darurat yang meliputi penyediaan tenda pengungsian, mie instan, obat-obatan, perahu karet, dan sebagainya. Perlu diketahui, bahwa lebih dari itu, bencana alam lebih banyak menelan biaya untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Gambar 1 menunjukkan sifat kebutuhan pembiayaan setelah terjadi bencana. Pembiayaan pada saat tanggap darurat lebih kecil dari pembiayaan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembiayaan tanggap darurat perlu disediakan dan didistribusikan dengan cepat dan tepat kepada korban. Tahap rekonstruksi memerlukan pembiayaan terbesar dan terlama untuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak dan hancur. Perlu waktu dan biaya yang tepat sesuai sifat kebutuhan pembiayaan pascabencana.

Selain korban jiwa dan harta benda, Indonesia juga menanggung beban keuangan yang berat dalam merespon dan memulihkan diri dari bencana alam. Sesuai dengan publikasi BKF (2018)[4], pada tahun 2000 sampai dengan 2016 Indonesia menderita kerusakan langsung akibat bencana sekitar Rp22,85 triliun pertahun. Nilai ini masih jauh di atas dana cadangan bencana yang dialokasikan dalam APBN untuk mendanai tanggap darurat dan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah, yang masih berada pada kisaran Rp3,1 triliun pertahun pada tahun 2005 sampai dengan 2017.

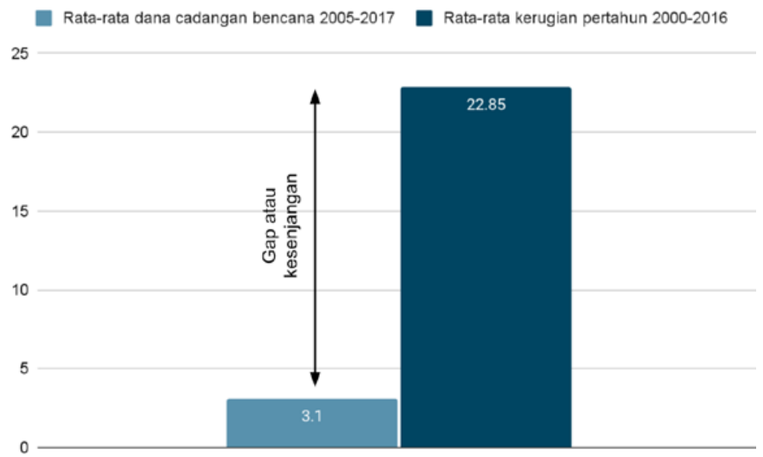

Gambar 2. Kesenjangan Pembiayaan Bencana (dalam Triliun Rupiah)
Sumber: diolah dari Kemenkeu (2018)

Dari berbagai pengalaman pengelolaan pembiayaan dana cadangan pada kejadian bencana-bencana berskala besar pada satu dekade terakhir, dapat disimpulkan bahwa kapasitas pembiayaan APBN secara rata-rata berada pada angka di bawah 20% dari nilai kerugian ekonomi. Gambar 2 menampilkan *gap* atau kesenjangan pembiayaan bencana yang cukup besar sebagai selisih rata-rata kerugian dengan dana cadangan yang dialokasikan dalam APBN untuk bencana.

Gap atau kesenjangan ini menyebabkan pemerintah terpapar risiko fiskal yang tinggi karena bencana. Risiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN di masa mendatang sehingga kemampuan fiskal dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan semakin berkurang dan tidak memadai. Risiko fiskal yang besar dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya akan membahayakan keberlangsungan fiskal dan stabilitas makro ekonomi.

Jika bencana terjadi, dengan terpaksa alokasi anggaran harus bergeser untuk memenuhi kebutuhan pemulihan akibat bencana alam, padahal APBN telah dipetakan dengan teliti sebelum tahun

[3] *Ghesquiere, F., & Mahul, O. (2010). Financial protection of the state against natural disasters: a primer. World Bank Policy Research Working Paper, (5429).*

[4] *Kementerian Keuangan. (2018). Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana.2.*

berjalan untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan program-program pemerintah daerah. Jika para pengambil kebijakan tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang cukup untuk membiayai tanggap bencana, mereka menjadi bergantung pada bantuan dari luar dan cukup membuat kelimpungan ketika bencana besar tiba-tiba terjadi. Tidak ada jaminan bahwa bantuan luar negeri dapat mencukupi biaya tanggap darurat dan rehabilitasi. Kemandirian bangsa juga semakin dipertaruhkan apabila bangsa Indonesia tidak bisa berdikari setelah sekian lama memproklamasikan kemerdekaan.

Penelitian Madjid (2018) menunjukkan bahwa karena keterbatasan anggaran, dibutuhkan sumber alternatif pendanaan bencana di samping dana APBN[5]. Terlebih lagi, pada tahun 2018, Menteri Keuangan menyadari akan masalah penanggulangan bencana yang ada di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa dalam berbagai kesempatan sering kali muncul pertanyaan: 1) Mengapa dana yang disediakan Pemerintah selalu terlihat kecil dibandingkan dengan kerugian yang dialami Pemerintah dan masyarakat ketika terjadi bencana besar? 2) Mengapa masih ada bangunan publik yang belum juga dibangun kembali beberapa tahun setelah bencana?[6]

Gambar 3. Pemandangan Siswa SDN 6 Pohgading Belajar di Teras Sekolah
Sumber: M. Gazali/Radar Lombok (2022)

Pertanyaan Menteri Keuangan mengenai tidak kunjung terbangunnya fasilitas publik setelah bencana tidaklah mengada-ada. Gambar 3 bukanlah gambar ketika siswa bersantai menikmati kudapan di depan sekolah, tetapi gambar ini adalah tempat mereka belajar sehari-hari. Sampai April 2022, pembangunan ruang belajar siswa di SDN 6 Pohgading Kecamatan Pringgabaya tak kunjung dirasakan oleh siswa. Akibat bencana gempa di tahun 2018 lalu, ruang kelas belum diperbaiki sampai sekarang. Sekolah ini sebenarnya memiliki 6 ruang belajar dan 1 ruang guru. Setelah diguncang gempa, dari 3 ruangan yang tersisa, 1 ruangan dimanfaatkan untuk guru, dan 2 ruangan lainnya digunakan belajar siswa kelas lima dan enam. Dengan terpaksa, siswa kelas lainnya harus belajar di teras sekolah secara berdampingan.

Pertanyaan Menteri Keuangan pada tahun 2018 tersebut juga secara bertahap mulai terjawab dengan solusi berupa peluncuran payung hukum dalam rangka pendanaan inovatif berbentuk dana bersama atau *Pooling Fund* Bencana (PFB), melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. PFB adalah dana yang berasal dari berbagai sumber dan digunakan untuk mendukung dan melengkapi Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan berkelanjutan. PFB hadir untuk menutup celah pendanaan atau *financing gap*, sekaligus mempercepat proses penanganan bencana. Meskipun sudah lama terbit, PFB belum banyak dikenal masyarakat sehingga masih perlu disosialisasikan. Salah satu bukti langkah cepat PFB yang tidak hanya sempurna di atas kertas adalah PFB telah mengumpulkan dana kelolaan sebesar kurang lebih Rp7,3 triliun. Dengan kinerja yang baik, diharapkan dana kelolaan dapat terus meningkat dan disalurkan secara optimal.

PFB merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan komitmen untuk memperkuat ketahanan fiskal dalam menanggulangi dampak bencana alam dan non-alam. PFB dikelola secara otonom oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU) di Kemenkeu, yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Dengan menggunakan prinsip kerja BLU, PFB tidak hanya memobilisasi atau mengumpulkan dana, tetapi juga melakukan investasi dan akumulasi atas dana yang dihimpun. Sebagai bagian dari Strategi Pendanaan dan Asuransi Risiko Bencana, PFB mengatur strategi pendanaan risiko bencana melalui APBN/APBD, atau memindahkan risikonya kepada pihak ketiga melalui pengasuransian aset pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, nilai kerusakan akibat bencana alam yang ditanggung pemerintah dapat ditekan.

[5] *Madjid, N. C. (2018). Analisis metode penghitungan dan alokasi anggaran bencana alam. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 1046-1065.*

[6] *Kementerian Keuangan. (2018). Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana*

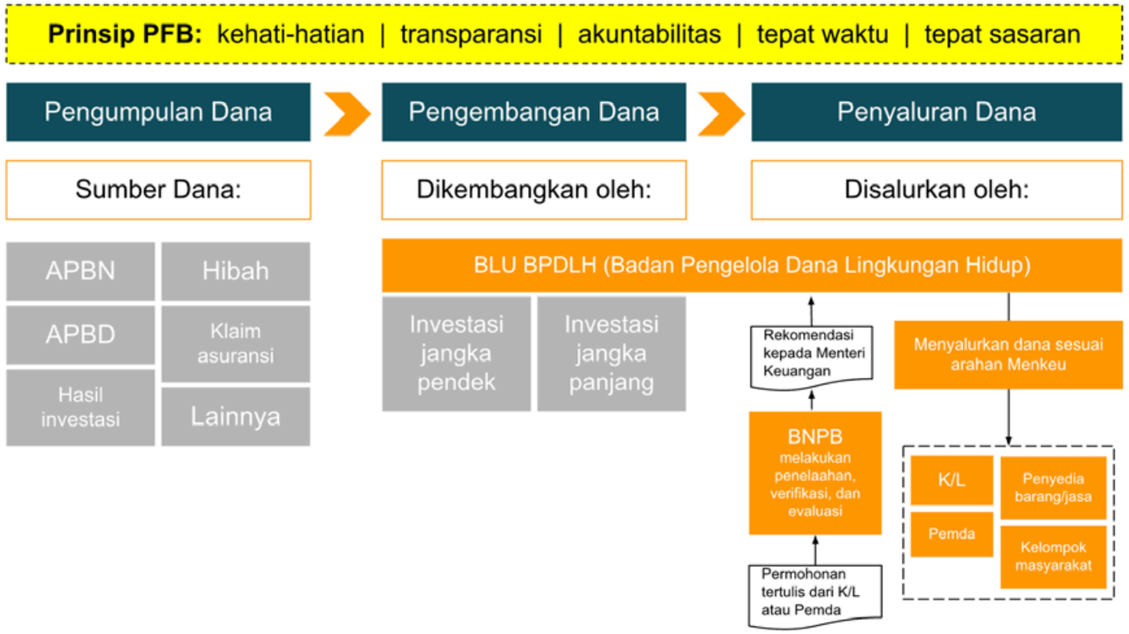

Gambar 4. Skema *Pooling Fund* Bencana di Indonesia
Sumber: diolah sendiri dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021

Selain itu, adanya PFB diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan melindungi masyarakat yang paling terdampak, yaitu masyarakat miskin dan rentan.

Perlu diketahui bahwa *pooling fund* yang dirancang harus benar-benar tepat. Dalam manajemen bencana, cadangan dana ditentukan oleh permintaan yang tidak pasti. *Overstock* dapat menyebabkan dana terbuang sia-sia, sementara kekurangan meningkatkan tekanan pembelian di lingkungan pascabencana. Alokasi dana untuk pengadaan cadangan prabencana dan pascabencana menjadi dilema. Berdasarkan data dari bencana banjir di Heilongjiang, Cina, penelitian Liu et al. (2022)[7] menunjukkan bahwa pengurangan biaya bantuan pemerintah dapat dilakukan lebih efektif dengan mengadopsi asuransi daripada menerapkan kontrak opsi atau hanya mengembalikan pasokan bantuan yang tidak terpakai. Studi ini menegaskan keuntungan dari asuransi bencana.

Gambar 4 menunjukkan skema *Pooling Fund* Bencana di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, pengelolaan PFB meliputi pengumpulan dana, pengembangan dana, penyaluran dana, dan penugasan lain sesuai dengan arahan Menteri Keuangan. Masyarakat tidak perlu khawatir karena PFB memenuhi prinsip yang kuat yaitu kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, tepat waktu, dan tepat sasaran. PFB dapat bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lainnya yang sah. PFB yang bersumber dari APBD merupakan partisipasi Pemerintah Daerah melalui mekanisme belanja hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PFB tidak hanya dikumpulkan atau ditimbun semata, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Ibarat kata, dengan hitungan sederhana, apabila dana terkumpul Rp100.000,00, kemudian diinvestasikan menghasilkan Rp10.000,00, maka uang Rp10.000,00 ini adalah hasil yang dapat menambah dana yang dikumpulkan untuk membiayai bencana menjadi Rp110.000,00. Setelah dikembangkan, PFB kemudian disalurkan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, tahap darurat bencana, tahap pascabencana terutama kegiatan pemulihan, dan untuk pendanaan transfer risiko.

Siapakah yang menyalurkan dana bersama? Penyaluran Dana Bersama dilakukan oleh BPDLH kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Pemda), kelompok masyarakat, atau penyedia barang atau jasa. Kelompok masyarakat merupakan kelompok yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah. Penyedia barang

[7] *Liu, T., Shao, J., & Wang, X. (2022). Funding allocations for disaster preparation considering catastrophe insurance. Socio-Economic Planning Sciences, 84, 101413.*

atau jasa merupakan penyedia barang atau jasa yang ditunjuk oleh K/L atau Pemda. Dalam menyalurkan dana kepada kelompok masyarakat, Pemda dan/atau K/L membentuk tim fasilitator, yang bertugas untuk membantu kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang didanai oleh BPDLH.

Untuk menjamin tata kelola pemerintah yang baik, penyaluran Dana Bersama pada tahap prabencana maupun pascabencana dilakukan dengan prosedur administratif yang terstruktur. Harus ada permohonan tertulis dari Pemda atau K/L kepada BNPB untuk menyalurkan dana. Berdasarkan permohonan tertulis tersebut, BNPB melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi setelah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi, BNPB meminta pertimbangan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri. Hasil telaahan, verifikasi, evaluasi, dan pertimbangan tersebut ditetapkan oleh Kepala BNPB dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Penyaluran untuk pendanaan transfer risiko dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi maupun asuransi syariah. Pembayaran premi asuransi atau kontribusi asuransi syariah dilakukan langsung oleh BPDLH kepada perusahaan asuransi atau asuransi syariah. Akan tetapi, polis asuransi dapat dipegang oleh K/L, Pemda, atau BPDLH. Dalam hal terjadi klaim asuransi, pembayaran klaim dari perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah disetorkan ke rekening BPDLH. Dana dari pembayaran klaim asuransi tersebut disalurkan untuk pendanaan perbaikan, pembangunan kembali, atau penggantian atas objek yang dipertanggungkan sesuai nilai pembayaran klaim.

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, sesuai dengan data yang dilansir dari laporan keuangan BLU BPDLH tahun 2021 (*audited*), masih belum terdapat dana yang terkumpul maupun penyalurannya. Akan tetapi, setelah satu tahun lebih telah berlalu, dana PFB menunjukkan progres. Dalam kesempatan awal, dana PFB yang telah terkumpul bersumber dari pemerintah pusat, yaitu sebesar Rp3 triliun dari APBN tahun 2022 dan Rp4,3 triliun dari APBN 2023. Per Maret 2023, total dana PFB yang dikelola BPDLH telah mencapai Rp7,4 triliun. Atas dana yang berhasil dihimpun ini tidak perlu dikhawatirkan karena Menteri Keuangan menjamin bahwa dana tersebut akan dijaga dengan baik jika belum disalurkan[8]. Ke depannya, kontribusi pemerintah daerah kepada dana PFB ditentukan salah satunya berdasarkan profil risiko bencana di daerah masing-masing dan besaran Dana Alokasi Umum (DAU)[9]. Artinya, semakin berpotensi daerah tersebut terkena bencana dan juga semakin besar DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat, maka semakin besar kontribusi daerah tersebut terhadap PFB. Hal ini sangatlah logis, karena mempertimbangkan aspek proporsionalitas. Diharapkan PFB dapat memberikan semangat kebersamaan semua komponen bangsa terutama pusat dan daerah, semulia namanya "Dana Bersama Penanggulangan Bencana" yang menjadi judul peraturan presiden yang mendasarinya.

APBN adalah #UangKita. Uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebenarnya, seluruh #UangKita lebih dari cukup untuk menanggulangi bencana, tetapi menjadi tidak cukup untuk membiayai sektor prioritas yang lain. *Pooling Fund* Bencana (PFB) hadir memberikan kesempatan kepada #UangKita untuk fokus pada sektor prioritas. Biarlah PFB dikelola, mengepakkan sayapnya demi pembiayaan bencana yang optimal di negeri tercinta.

[8] *https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6596845/dana-bencana-urunan-yang-dibuat-sri-mulyani-sudah-terkumpul-rp-74-t*

[9] *https://www.jawapos.com/ekonomi/01439773/sri-mulyani-dana-bersama-bencana-telah-terkumpul-rp74-triliun*

MUHAMMAD RIFKY SANTOSO
WIDYAISWARA MADYA BALAI DIKLAT KEUANGAN MEDAN

CELAH BIAYA JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG

PENDAHULUAN

Pasal 4 ayat 1 huruf f Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menjelaskan bahwa penerimaan bunga adalah objek pajak penghasilan. Pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. UU PPh ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian lebih lanjut mengenai imbalan karena jaminan pengembalian utang. Peraturan perpajakan lainnya yang mengatur mengenai imbalan atas jaminan utang secara spesifik juga belum ada. Bila menggunakan prinsip *taxable-deductible*, maka pembayaran atas bunga bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Transaksi ini bisa digunakan sebagai sarana oleh wajib pajak (WP) untuk memindahkan penghasilan maupun biaya melalui transaksi *transfer pricing*. Bila ada indikasi terjadi transfer pricing atas transaksi ini, maka peraturan pajak Indonesia menggunakan OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administration. Ketika pemeriksa pajak menemukan transaksi ini, juga bisa menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Namun demikian, masih ada celah yang bisa digunakan oleh wajib pajak, terutama yang merupakan bagian dari perusahaan multinasional, untuk melakukan skema transfer pricing. Fakta ini terlihat pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010293.15/2018/PP/M.VIIIB tahun 2020. Transaksi yang ada pada Putusan Pengadilan Pajak ini antara lain WP membayar fee kepada salah satu perusahaan afiliasi yang ada diluar negeri. Pembayaran fee ini dilakukan karena perusahaan afiliasi tersebut memberikan garansi terhadap utang yang dilakukan oleh WP. Menurut Majelis Hakim, biaya yang dikeluarkan oleh WP yang berupa fee tersebut bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun demikian, jika dianalisa lebih lanjut, ternyata jaminan (garansi) yang diterima oleh WP sifatnya bukan jaminan untuk membantu pembayaran utang WP jika tidak mampu membayar. Jaminan yang ada adalah bahwa penjamin tidak akan melakukan tindakan mengganggu stabilitas keuangan WP. Selain itu, pembebanan atas fee ini ditahun dilakukannya pembayaran, bukan di tahun terjadinya jaminan. Terjadinya jaminan terlihat pada saat masih adanya utang dari pihak yang dijamin.

Dari kasus putusan pengadilan pajak ini, perlu dikaji lebih lanjut mengenai jenis jaminan yang ada pada perusahaan afiliasi yang berhubungan dengan utang. Dengan demikian bisa diketahui fee atas jaminan apa saja yang layak sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jika tidak ada peraturan lebih lanjut, maka akan timbul banyak skema jaminan atas pinjaman yang sifatnya tidak mengikat dan bukan jaminan untuk membayar utang jika pihak yang dijamin tidak mampu melunasi utangnya. Selain itu, perlu juga dipastikan adanya utang dan persyaratan lain saat terjadinya pembebanan fee jaminan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

PEMBAHASAN

Ketika Wajib Pajak akan melakukan pinjaman, maka pihak pemberi pinjaman biasanya meminta jaminan. Jaminan ini merupakan cara mengurangi risiko pemberi pinjaman bila peminjam tidak mampu membayar utangnya. Jaminan ini bisa dalam bentuk barang berwujud dan bisa bentuk lain, seperti jaminan personal. Jaminan personal ini adalah pernyataan kesanggupan dari pihak ketiga untuk membayar utang pihak yang berutang bila tidak sanggup melunasi utangnya.

Untuk mengurangi risiko yang ada, penjamin meminta imbalan (fee) dari pihak yang berutang (yang dijamin). Fee yang diterima merupakan objek pajak dan pemberi fee bisa mengurangi fee tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dalam implementasinya, agar bisa memberikan keuntungan, maka bisa dibuat beberapa rekayasa transaksi yang disamarkan menjadi jaminan atas pinjaman. Rekayasa yang dilakukan pada perusahaan afiliasi. Rekayasa ini disebut sebagai jaminan internal atas piutang namun secara substansi tidak secara langsung sebagai jaminan untuk membayar utang, atau tidak mengikat secara legal.

PricewaterhouseCoopers (PWC)[1] menjelaskan ada 3 tipe jaminan internal yang perlu menjadi perhatian dalam

[1] *Navigating the complexity Finding from the financial transactions transfer pricing global survey 2013, halaman 20-21*

melihat kewajarannya, yaitu (1) *comfort letters/letters of intent*; (2) *Keep-well agreement*; dan (3) *Explicit credit guarantee. Comfort letter* adalah suatu janji dan bukan komitmen yang terikat secara hukum, dari suatu perusahaan di grup usaha, biasanya induk perusahaannya, yang menyatakan untuk menahan diri dari mengambil tindakan yang bisa membahayakan stabilitas keuangan anak perusahannya. *Keep-well agreement* adalah pernyataan yang diberikan oleh perusahaan induk bahwa dia akan memberikan modal tambahan kepada anak perusahaannya untuk mencegahnya dari *default* (gagal bayar). *Explicit credit guarantee* adalah komitmen yang mengikat secara hukum dari penjamin untuk membayar jumlah uang kepada pihak kreditur (pemberi pinjaman) dalam hal suatu perusahaan di grup yang sebagai debitur (melakukan pinjaman) gagal memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Dari ketiga jenis jaminan internal ini, PWC menjelaskan bahwa hanya jenis jaminan *explicit credit guarantee* yang mempunya kekuatan hukum. Bila ada jaminan jenis ini, maka apabila debitor gagal bayar, maka kreditor bisa memaksa penjamin untuk melunasi utang debitor. Sementara itu, jenis jaminan lainnya, *comfort letter* dan *keep-well agreement* tidak mempunyai kekuatan hukum. Jaminan yang diberikan hanya bersifat moral. Kreditor tidak bisa memaksa penjamin untuk melunasi utang debitor yang gagal bayar dari kedua jaminan jenis ini. Dari perspektif *transfer pricing*, maka jenis transaksi ini perlu dikaji lebih lanjut, apakah termasuk jenis jasa yang memang dibutuhkan atau merupakan strategi *tax avoidance* (pengelakan pajak).

Organization of Economic Co-operation and Development atau OECD Guidelines menjelaskan transaksi atas jaminan pengembalian utang dari perusahaan afiliasi sebagai *intra-group service*, yaitu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam satu grup usaha. Agar biaya ini bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka isunya adalah (1) apakah biaya ini benar-benar terjadi dan (2) apakah transaksi yang terjadi memenuhi prinsip *arm's length*. Agar biaya atas transaksi ini memenuhi kewajaran (*arm's length*)[2], maka perlu dianalisa dari alasan adanya transaksi jaminan ini, dan perlu ditentukan *benefit* yang diperoleh dari pihak yang membayar fee atas jaminan ini. Prinsip *arm's length* menyatakan bahwa harga yang disepakati dalam transaksi antara dua pihak yang berelasi harus sama dengan harga yang disepakati dalam transaksi yang sebanding antara dua pihak yang tidak berelasi.

Peraturan pajak di United Kingdom (UK) menjelaskan bahwa jaminan internal atas pinjman ini terdiri dari 2, yaitu (1) *implicit loan guarantee*, dan (2) *explicit loan guarantee*[3].*Implicit loan guarantee* hanya bersifat moral. Perlu banyak pertimbangan apakah pembayaran fee atas *implicit loan guarantee* ini bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau tidak, misalnya perbandingan rating antara perusahaan pemberi dan penerima jaminan, dan reputasi perusahaan pemberi jaminan. Selain itu diteliti lebih lanjut apakah *implicit loan guarantee* ini termasuk skema *thin capitalization* atau tidak. Jika pembayaran fee untuk *explicit loan guarantee* ingin digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka bisa menggunakan pedoman yang ada pada OECD Guidelines.

Ketika *fee* atas *loan guarantee* berhubungan dengan *transfer pricing*, maka langkah yang harus dilakukan menurut OECD Transfer Pricing Guidelines adalah (1) tentukan sifat dari jaminan (*the nature of the guarantee*), (2) gambarkan jaminan secara akurat, dan (3) harganya wajar (*arm's length pricing*)[4]. Sifat jaminan ini harus tertulis dan terdapat komitmen terikat secara legal (hukum) bagi penjamin. Harus jelas tertulis apa saja yang dijamin oleh penjamin terhadap debitur yang dijamin. Harus jelas dan akurat jaminan yang diterima dari segi manfaatnya. Debitur yang dijamin harus menerima manfaat dari faktor ekonomi atau komersil, seperti bertambahnya jumlah pinjaman bila dibandingkan tanpa ada jaminan dan turunnya biaya pinjaman.

Untuk menentukan kewajaran *fee* atas jaminan ini, maka dilakukan analisa perbandingan yang ada, misalnya dengan metode CUP (*Comparable Uncontrolled Price*) dan menganalisa *beneficiary owner* dari transaksi penjaminan utang ini.

Salah satu kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010293.15/2018/PP/M.VIIIB tahun 2020 menjelaskan ada salah satu sengketa antara Wajib Pajak (WP) dengan DJP mengenai beban *fee* atas jaminan internal dari pengembalian utang. WP ini membayar *fee* atas jaminan internal atas utang yang salah satunya bersifat *soft* dan tidak terikat secara hukum (*implicit loan guarantee*). WP menyatakan telah membayar *fee* ini, mendapat manfaat atas jaminan yang diberikan, dan jumlah *fee* yang dibayarkan wajar sesuai dengan *Transfer Pricing Documentation* yang dilaporkan kepada DJP. Dari hasil pemeriksaan DJP diketahui bahwa tidak ada dokumen yang menyatakan jaminan ini memang dibutuhkan oleh WP untuk mendapatkan keuntungan dan memang dipersyarakatkan oleh bank yang memberikan pinjaman. DJP juga menemukan bahwa pembayaran *fee* atas jaminan ini di tahun 2015 dan utang WP dari bank terjadi pada tahun 2014. WP membebankan fee ini di tahun 2015 sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pada sengketa ini, DJP tidak bisa meyakinkan Majelis Hakim baik berdasarkan peraturan yang ada dan berdasarkan data. Majelis Hakim membatalkan koreksi DJP dan mengabulkan permohonan banding WP.

Peraturan pajak di Indonesia tidak mengatur lebih detil mengenai jaminan internal ini. Untuk transaksi dengan pihak yang ada hubungan istimewa, maka otoritas pajak di Indonesia (DJP) bisa menggunakan OECD Guidelines. Dalam skema transaksi *tax avoidance* yang menggunakan jaminan internal ini, bisa saja jasa jaminan diberikan oleh pihak yang tidak ada hubungan istimewa menurut UU PPh dan *tax treaty*, namun masih dalam satu grup usaha. Jenis jaminan internal yang terjadi bisa saja tidak punya kekuatan hukum yang kuat, dan hanya bersifat moral seperti jenis perjanjian *comfort letters/letters of intent.* Oleh karena itu DJP perlu memperkuat perlakuan terhadap transaksi jaminan internal ini dengan peraturan yang lebih memadai, sehingga jelas bisa atau tidak bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dengan menggunakan beberapa referensi yang ada, peraturan pajak mengenai biaya atas fee jaminan internal pengembalian utang sebaiknya memperhatikan sifat dan legalitasnya, manfaat ekonomi/komersil yang diterima oleh pihak yang dijamin, serta kewajarannya (*arm's length*). Selain itu, perlu juga memperhatikan kasus-kasus yang ada, seperti kapan sebaiknya fee jaminan ini bisa sebagai pengurang penghasilan bruto, saat dibayarkan atau terutang. Bisa saja pada satu perjanjian utang dijamin oleh lebih dari satu penjamin yang sama-sama dari satu grup usaha. Pertanyaannya adalah, bisakah pembayaran fee kepada lebih dari satu penjamin ini diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Ketika transaksi ini terjadi antar perusahaan dalam satu grup usaha dan tidak memenuhi definisi pihak yang ada hubungan istimewa (*related party*), baik menurut *tax treaty* maupun UU PPh, apakah masih bisa disebut dengan jaminan internal? Ketika dari hasil pemeriksaan disepakati bahwa fee atas jaminan ini tidak bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak bagi pihak yang membayar fee, apakah penerimaan fee ini diperlakukan menerima penghasilan kena pajak atau tidak kena pajak? Kondisi ini perlu menjadi perhatian DJP saat menyusun peraturan yang lebih detil mengenai jaminan internal atas pengembalian utang.

KESIMPULAN

UU PPh menjelaskan bahwa penerimaan bunga merupakan penghasilan kena pajak. Imbalan karena jaminan pengembalian utang termasuk dalam pengertian bunga. Dengan menggunakan prinsip *taxable deductible*, maka pembayaraan atas jaminan pengembalian utang, yang merupakan pembayaran bunga, bisa sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dalam prakteknya, jaminan ini bisa dari pihak internal dan eksternal di perusahaan grup (*multinational company*). Jaminan internal berasal dari perusahaan yang berada dalam satu grup usaha. Jaminan internal ini berhubungan dengan *transfer pricing* dan perlu diperhatikan kewajarannya (*arm's length*).

Jenis jaminan internal ada yang punya kekuatan legal yang mengikat dan ada yang besifat moral. Ketika berhubungan dengan kewajaran *transfer pricing*, maka perlu diteliti lebih lanjut apakah jaminan ini memang benar terjadi, memberikan manfaat secara ekonomi bagi penerima jaminan, dan pembayaran fee-nya sudah wajar. OECD telah memberikan *guidelines* (panduan) atas transaksi ini dan termasuk dalam jenis *intra-group services*. Indonesia belum punya peraturan perpajakan secara khusus mengenai transaksi ini. Jika mengikuti OECD Guidelines, maka bisa membantu DJP untuk menyelesaikan masalah jika ada sengketa atas transaksi ini. Namun demikian, perlu dibuat peraturan khusus yang belum ada di OECD Guidelines, seperti masih berlaku atau tidaknya prinsip *taxable-deductible* jika ternyata fee yang dibayarkan tidak memenuhi syarat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari hasil pemeriksaan.

[2] *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, January 2022, halaman 314.*

[3] *https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm501050 dilihat tanggal 10 Januari 2023 jam 11.37 WIB.*

[4] *https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/financial-guarantees-and-intercompany-considerations.html, dilihat tanggal 10 January 2023 jam 12.08 WIB.*

JAMILA LESTYOWATI

FORUM PAKSIAPI DANA RAKCA: TUNTAS BERINTEGRITAS

Integritas itu harga mati dan bersifat universal. Siapapun manusianya, dari berbagai latar belakang pendidikan, budaya, daerah, negara, status sosial, dan lain-lain akan mengakui bahwa integritas menjadi modal berharga yang harus dimiliki. Berbekal semangat untuk menghadirkan Indonesia masa depan yang bebas dari korupsi, dengan mendasarkan pada nilai-nilai kementerian keuangan yang ada, maka sejarah itu dimulai.

"Penyuluhan antikorupsi menjadi bagian dari inisiatif strategis penguatan budaya di Kemenkeu" ungkap Andin Nurita, Paksi dari Sekjen.

Maka tahun 2018, CTO bekerja sama dengan BPPK dan KPK menyelenggarakan workshop penyuluh antikorupsi (Paksi) tanggal 12 – 19 September 2018. Kegiatan dilanjutkan dengan sertifikasi Paksi di tahun yang sama yang diikuti 43 peserta. Pada tahun yang sama juga terdapat sertifikasi Paksi yang diikuti oleh pegawai Kemenkeu dari jalur pengalaman.

SEJARAH PEMBENTUKAN FORUM PAKSIAPI DANA RAKCA

Masa demi masa dilalui. Kegiatan penyuluhan antikorupsi dilakukan oleh para Paksi di berbagai daerah di Indonesia. Perlahan jumlah Paksi Kemenkeu terus bertambah. Mereka juga bergabung dengan sesama Paksi dari forum lain, baik yang berbasis kewilayahan maupun Lembaga. Para Paksi dari Kemenkeu terus bergerak. Menyadari jumlah yang semakin banyak, maka diinisasi sebuah forum Paksi sebagai tempat saling berbagi. Sampai akhirnya secara resmi, forum ini dikukuhkan pada Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022.

"Saya berharap pimpinan unit eselon I memperhatikan komunitas ini. Jadi, tidak hanya dipanggil menjelang hari antikorupsi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada sambutan pengukuhan forum sekaligus peringatan puncak Hakordia Kemenkeu, Selasa 13/12/2022 dan pengumuman instansi lolos penilaian WBK WBBM Kemenkeu.

Selanjutnya Menkeu menegaskan "Empower, berikan afirmasi [kepada Paksiapi Dana Rakca] sehingga dia menjadi bagian dari gaya kerja, gaya hidup kita, gaya kita bersikap. Karena apa yang disebut fraud atau penyelewengan itu selalu terjadi."

Melalui KMK Nomor 490/KMK.09/2022 tentang Pembentukan Forum Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas Dana Rakca Kementerian Keuangan tanggal 12 Desember 2022, forum ini semakin berkiprah.

Kusuma Santi, Koordinator Paksiapi Dana rakca yang juga Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menjelaskan, Forum Paksiapai Dana Rakca hadir sebagai wadah koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi Paksi dan API antarunit eselon I kemenkeu atau pihak lainnya terkait dengan kegiatan pembangunan budaya integritas dan pencegahan antikorupsi.

"Harapannya Paksiapi Dana Rakca semakin berdaya dalam melakukan penyuluhan antikorupsi di lingkungannya," ujar Kusuma Santi.

PAKSI DAN AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS (API)

Paksi adalah seorang yang memiliki kemampuan menyampaikan nilai antikorupsi, mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, memberdayakan, membimbing, mendampingi, dan menggerakkan masyarakat, aparatur sipil negara dan aparat penegak hukum dan militer, swasta, dan komunitas untuk menjadi agen perubahan dan menjadi *role model* dalam upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan API adalah personil bersertifikasi yang berkompetensi membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan penyuluhan antikorupsi merupakan bentuk dukungan peran serta aktif Paksi dan API dalam kegiatan pencegahan korupsi, khususnya edukasi antikorupsi dan/atau pembangunan sistem integritas yang mengacu pada kerangka kerja integritas di lingkungan Kemenkeu. Berdasarkan KMK 490/KMK.09/2022, Paksiapi Dana Rakca bertugas melaksanakan aksi pembangunan integritas dan antikorupsi, berperan serta dalam pembangunan, pemantauan, dan evaluasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), melakukan koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi pelaksanaan tugas dan fungsi Paksi dan API, baik di internal maupun eksternal Kemenkeu dan memberikan masukan, saran, dan rekomendasi tindak lanjut implementasi kerangka kerja integritas di Kemenkeu.

RAGAM AKSI PAKSIAPI DANA RAKCA

Paksiapi Dana Rakca terus berkontribusi di berbagai daerah dan ragam kegiatan. Webinar, sosialisasi, penyuluhan antikorupsi dilakukan baik di unit kerja Kemenkeu maupun non-Kemenkeu. Beragam aksi penyuluhan antikorupsi dilakukan melalui berbagai kegiatan, media dan metode. Misalnya Handoko Nindyo Wardono, anggota Paksiapi Dana Rakca dari DJBC ini menyampaikan materi tentang budaya antikorupsi melalui kegiatan olahraga karate. Azizah Nuur Utami (Sekjen), yang juga anggota Forum Paksi SUFI menggunakan media film untuk penyuluhan. Gatot Sulandoko, dari DJP membawakan tausiyah nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan "Ngaji Tani" untuk komunitas Tajuk Tani Kota Batu. Penyuluhan melalui budaya juga dilakukan oleh Aniek dan Agus Suharsono (BPPK), yang juga menjadi anggota PAK SIJI DIY. M. Mudzakkir, dari DJBC menyuluh dengan cara yang unik di media sosial. Beragam metode/ media, misalnya pantun dan puisi juga digunakan oleh para anggota forum ini untuk menyuluh. Selain melalui lisan, penyuluhan

antikorupsi juga banyak dilakukan melalui tulisan. Jamila Lestyowati (BPPK) mempublikasikasikan artikel/ paper ilmiah mengenai antikorupsi.

Kelompok sasaran kegiatan penyuluhan juga bervariasi. Berkiprah melalui jalur keagamaan juga dilakukan oleh para anggota forum ini. Riznandi (DJP) yang juga aktif di forum Paksi Ampera Sumsel melakukan penyuluhan kepada para santri. Demikian juga dengan Hotmanuel S Tampubolon (DJPb) yang juga aktif di Paksi Kalteng melalui penyuluhan antikorupsi di gereja. Bukan hanya ASN, penyuluhan menyasar dokter, perawat, hakim, perangkat desa, mahasiswa, murid di berbagai level sekolah. Kemenkeu mengajar menjadi salah satu kegiatan para penyuluh antikorupsi beraksi dengan sasaran murid sekolah.

Dari 41 forum Paksi yang ada di Indonesia, Paksiapi Dana Rakca dengan jumlah anggota terbanyak ini mengusung semangat untuk selalu menerapkan nilai-nilai integritas dan berbagi hal-hal kebaikan kepada pihak lain. Selain berkontribusi pada forum lain baik kewilayahan maupun bidang tertentu, Forum Paksiapi Dana Rakca juga berpartisipasi pada kegiatan level nasional. Tak kurang Jambore Nasional Paksiapi 2022 di Semarang, Temu Aksi Penyuluh pada Hakordia 2021 dan 2022 diikuti. Pada tahun 2022 ini barisan Paksiapi Kemenkeu tampak hadir dengan jumlah personal yang banyak. Paksiapi Dana rakca juga berkontribusi untuk pembentukan forum Paksi nasional.

Berbagai penghargaan diterima oleh Paksiapi Dana Rakca dari KPK. Mega Silvia Fahrani (Paksi teraktif 2022), Johana Lanjar Wibowo (PAKSI Inspiratif tahun 2021), Muflih Fathoniawan (PAKSI Teraktif Kategori ASN 2020), dan Rizki Wibias Anwar Maulida (PAKSI Kreatif 2020).

INTEGRITAS KEMENKEU

Kemenkeu memiliki visi menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Tentu tidak mudah untuk mewujudkan visi ini. Diperlukan SDM yang memiliki nilai-nilai integritas di dalamnya dan selalu mengedepankan nilai-nilai Kemenkeu. Bukan hanya oleh Paksi, setiap insan Kemenkeu dituntut untuk memiliki nilai ini. R. Patrick Wahyudwisaksono menjadi pelopor Ahli Pembangun Integritas pertama di Kemenkeu menjelaskan proses transformasi Kemenkeu dari tahun ke tahun semakin baik. Paksi dan API di Kemenkeu bekerja sama untuk mewujudkan hal ini.

Untuk lebih mendapatkan dampak yang semakin luas, Paksiapi Dana Rakca memiliki akun Instagram @paksiapi. danarakca. Paksiapi Dana Rakca juga berkolaborasi dengan forum-forum dan komunitas lain baik dengan internal maupun eksternal Kemenkeu. Tak kurang, 408 Paksi dan 3 API di Kemenkeu. Bukanlah angka yang banyak. Justru sangat sedikit. "Kok *sithik*?" tanya Menkeu saat pengukuhan forum. Pelan-pelan angka ini akan bertambah. Program pemberdayaan dan penguatan Paksiapi akan terus dilakukan. Jalur sertifikasi baik melalui pendidikan, pengalaman, dan mata kuliah, lengkap ada di institusi ini. Tahun 2023 ini rencana akan dilaksanakan Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) Kemenkeu dengan peserta dari duta transformasi. Forum terus mendorong anggotanya untuk *Recognition Current Competency* (RCC) maupun naik jenjang. Harapannya forum ini akan semakin berdaya, bukan hanya dari sisi jumlah, namun memang kualitas yang selalu terjaga.

RANDY FEBRIATAMA

PUBLISH OR PERISH

"Publish or Perish" adalah frase yang umum digunakan dalam lingkungan akademis untuk menggambarkan tekanan yang dihadapi oleh peneliti dan akademisi untuk menerbitkan karya mereka guna memajukan karir mereka. Maksud dari Publish disini adalah menerbitkan artikel kedalam jurnal, sedangkan perish berarti hilang atau mati. Serupa dengan ungkapan "Merdeka atau Mati" yang biasa digalakkan oleh para pejuang terdahulu.

Konsep "publish or perish" didasarkan pada gagasan bahwa karir akademis dibangun di atas dasar output riset. Semakin banyak artikel yang diterbitkan oleh seorang peneliti, semakin besar kemungkinan ia mendapat pengakuan dari rekan-rekannya, memperoleh jabatan, dan naik pangkat di bidangnya. Tekanan untuk menerbitkan bisa sangat kuat, dengan beberapa peneliti merasa bahwa mereka harus terus menghasilkan riset baru untuk tetap unggul dalam persaingan pada karir akademik.

Selain karir, tekanan untuk menerbitkan riset berhubungan dengan sejumlah faktor, diantaranya: persaingan dalam mencari pendanaan riset, keinginan untuk mendapatkan pengakuan dan prestise akademik, serta kebutuhan untuk menarik mahasiswa dan peneliti ke universitas atau lembaga riset tertentu. Dalam beberapa kasus, tekanan untuk menerbitkan riset dapat menyebabkan praktik tidak etis, seperti menerbitkan riset yang telah dipalsukan atau dimanipulasi[1].

Di Vietnam, terdapat syarat untuk menerbitkan minimal dua artikel pada jurnal Internasional untuk mendapatkan gelar Ph.D. Kewajiban yang quality-oriented tersebut merupakan rintangan nyata bagi para kandidat Ph.D yang dapat mendorong terjadinya pelanggaran ilmiah dan manipulasi data. Namun, menerbitkan pada jurnal internasional bagi kandidat Ph.D merupakan kesempatan untuk mendobrak batas, melampaui standar, dan jalan yang akan bermanfaat bagi personal growth. Langkah "Publish or Perish" dari dunia Ph.D yang diberlakukan Vietnam memiliki dampak menguntungkan, yaitu untuk menjaga kepercayaan publik akan kualitas dari ilmu pengetahuan, dan mengefektifkan pendanaan akan riset ilmiah[2].

Selain contoh keuntungan dari tekanan "Publish or Perish" di Vietnam tersebut, terdapat lebih banyak kerugian yang ditimbulkan. Seperti dijabarkan pada buku Publish or Perish dari Moosa (2018), konsekuensi "Publish or Perish" adalah sebagai berikut[3]:

- Publikasi ilmiah meningkat dalam kuantitas tetapi menurun dalam kualitas. Hal tersebut disebabkan oleh tekanan yang diberikan kepada akademisi untuk mempublikasikan apa pun, ditambah dengan teknologi yang menyediakan sarana untuk copy paste dan mesin pencari.

- Menghambat penelitian inovatif dan proses penemuan. Ketika terdapat tekanan Publish or Perish, maka pengembangan ide baru adalah opportunity cost. Menerbitkan apa pun penting untuk kelangsungan hidup penulis dan untuk menghindari kebinasaan.

- Memperlambat penyebaran pengetahuan. Proses peer-review menyebabkan waktu yang lama untuk menerbitkan makalah di jurnal, terutama di jurnal yang bagus. Albert Einstein berhasil menerbitkan makalahnya yang berpengaruh dengan cepat karena dia tidak terhalang oleh peer review. Dia menerbitkan makalah yang berpengaruh karena itulah yang ingin dia lakukan daripada diwajibkan untuk melakukan penerbitan.

- Ketidakrelevanan praktis dari penelitian yang dipublikasikan. Sebagian besar penelitian yang diterbitkan tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Aplikasi praktis menjadi tidak relevan karena para akademisi yang dihantui oleh Publish or Perish menulis untuk diri mereka sendiri, bukan untuk masyarakat umum atau pembuat kebijakan. Publikasi telah menjadi tujuan dan bukan alat untuk mencapai tujuan.

- Bias terhadap peneliti dari negara berkembang dan non-berbahasa Inggris. Publish or Perish telah menjadi fenomena global. Bagi akademisi dari seluruh dunia, jurnal berbahasa Inggris layaknya McDonald's, Starbucks, dan film Hollywood, mereka ada dibanyak tempat dan dicari banyak orang. Padahal, pada suatu waktu, mungkin makalah terbaik dalam matematika diterbitkan di jurnal berbahasa Rusia dan mungkin makalah terbaik dalam fisika diterbitkan di jurnal berbahasa Jerman.

- Biaya dan harga jurnal yang sangat tinggi. Publish or Perish telah menyebabkan kelebihan permintaan ruang jurnal karena akademisi berusaha untuk menerbitkan dan tidak binasa. Akibatnya, biaya berlangganan jurnal kian menjadi mahal.

Publish or Perish dapat merugikan kesehatan dan kesejahteraan para akademisi yang ditekan untuk terus menerbitkan karya agar dapat mempertahankan keamanan kerja dan penghidupan. Tekanan ini dapat menyebabkan stres dan kehidupan yang tidak seimbang.

"Publish or Perish" memberikan tekanan yang kuat pada para peneliti dan akademisi untuk menerbitkan riset mereka guna memajukan karir dan mendapatkan pengakuan dalam lingkungan akademik. Meskipun tekanan ini dapat mendorong inovasi dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, namun juga dapat menyebabkan praktik tidak etis dan menurunkan kualitas publikasi ilmiah.

Dalam menyikapi tekanan "Publish or Perish" beberapa hal dapat dilakukan, seperti:

- Kelola waktu dan energi dengan baik. Buatlah jadwal yang masuk akal dan realistis untuk menyelesaikan proyek penelitian. Hal ini akan menghindari tekanan dan stres yang berlebihan, sehingga Anda dapat berfokus pada hasil penelitian Anda.

- Kolaborasi dengan peneliti lain dapat membantu membagi beban kerja dan menambah keahlian. Selain itu, hasil penelitian akan lebih baik dan lebih bermakna.

- Ingatlah bahwa tujuan akhir dari penelitian adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Fokus pada hal itu, dan bukan pada tekanan untuk mempublikasikan karya. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian akan memiliki makna yang lebih besar dan kontribusi yang lebih berarti bagi masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, fenomena "Publish or Perish" telah mendapat banyak respon dari para akademisi. "Get Visible or Vanish" merupakan salah satu filosofi terbaru dalam publikasi jurnal yang digadang-gadang akan menggantikan doktrin Publish or Perish. "Visible or Vanish" adalah alternatif dalam mendiseminasi pengetahuan melalui sosial media, dan membangun academic online persona[4].

Kemajuan teknologi telah merupah cara para akademisi berkomunikasi, dan akademisi yang tidak memiliki sosial media akan terlempar dari komunitasnya. Menggunakan sosial media untuk mendesiminasi penelitian dalam bahasa yang sederhana akan memberikan cakupan audien yang seluas mungkin. Dari feedback yang diberikan di social media tersebut maka dapat diukur impact dengan menggunakan alternatif metric yang dirancang khusus untuk sosial media.

Meskipun sosial media merupakan alat yang yang dapat menjangkau luas, tetapi ada bahaya yang jelas mengintai dalam dalam mengapresiasi sebuah ide atau ilmu. Ide atau ilmu tersebut dapat menjadi overrated maupun underated, tergantung dari profil yang mempostingnya. Seingga, hal tersebut adalah area yang pertama perlu mendapat perhatian[5].

Mungkin sekian tulisan mengenai Publish or Perish kali ini. Sebagai institusi yang bergerak dalam dunia pendidikan dan bersinggungan dengan publikasi, ada baiknya kita mengetahui hal-hal yang biasa menjadi struggle para penulis. Pada kesempatan berikutnya, saya akan mengulas mengenai aplikasi Publish or Perish, sebuah aplikasi yang membantu dalam pencarian tulisan ilmiah. Berbeda dengan istilahnya, aplikasi publish or perish lebih bernuansa positif dan menjanjikan.

[1] *Moosa, I.A. (2018) Publish or Perish: Perceived Benefits Versus Unintended Consequences. Cheltenham, UK, Glos: Edward Elgar Publishing.*

[2] *Vuong, QH. Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude. Nat Hum Behav 3, 1034 (2019)*

[3] *ibid*

[4] *Joanne Doyle & Michael Cuthill (2015) Does 'get visible or vanish' herald the end of 'publish or perish'?, Higher Education Research & Development, 34:3, 671-674*

[5] *Hall, N. The Kardashian index: a measure of discrepant social media profile for scientists. Genome Biol 15, 424 (2014).*

MUHAMMAD FATH KATHIN
ALUMNUS PROGRAM LINKAGE SBM ITB - UNIVERSITY OF GLASGOW

Dua Negeri, Satu Impian

Sebuah kisah yang diawali pada tahun 2014. Rasa penasaran menggelitik pribadi ini ketika melihat nama salah seorang narasumber sebuah seminar yang memiliki 2 gelar master di belakang namanya. “Keren”, “Kok bisa?”, “Luar Biasa”, hanya beberapa kesan yang saat itu muncul di diri ini pada saat itu. Hingga kemudian mencari informasi bahwa yang bersangkutan ternyata alumnus program beasiswa *double degree* sehingga dapat memiliki dua gelar bersamaan. Hingga akhirnya takdir membawa saya kepada beasiswa Kementerian Keuangan tahun 2019, bernama beasiswa FETA, dengan memberikan kesempatan pada saya untuk melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa linkage/*double degree.*

MENGASAH INOVASI, *AGILITY* DAN KEPEMIMPINAN DI SBM-ITB

Mendapatkan beasiswa, hanyalah awal perjuangan. Perjuangan berikutnya adalah proses mencari dan mendaftar ke universitas. Pilihan universitas dengan program *double degree* sangat terbatas dan tidak sebanyak program reguler. Dengan beberapa pertimbangan, saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) – ITB. Alasan saya melanjutkan pendidikan di SBM-ITB karena SBM-ITB dikenal sebagai sekolah bisnis terbaik di Indonesia. Di samping itu, alasan personal saya memilih ITB karena merupakan cita-cita lama saya untuk dapat menimba ilmu di kampus Ganesha.

Perkuliahan di ITB dimulai pada bulan Agustus 2020, ketika pandemi sudah menyerang Indonesia. Hal ini menyebabkan perkuliahan pun harus dilakukan secara daring. Beberapa kendala terkait perkuliahan secara daring harus dapat saya atasi. Apalagi perkuliahan di SBM – ITB yang sangat menitikberatkan pada bagaimana untuk dapat memecahkan masalah studi kasus secara *teamwork*. Sistem perkuliahan di SBM-ITB menggunakan pembelajaran interaktif dengan menggunakan studi kasus bisnis terbaru. Ditambah lagi, kami diharuskan untuk berinovasi dan bersimulasi menerapkan praktik terbaik dari berbagai perusahaan terkemuka baik lokal maupun global untuk kemudian dipresentasikan. Bahkan di beberapa kasus kami memberikan presentasi langsung di depan para *Board of Director* perusahaan ternama. Diskusi-diskusi *online* menjadi menu harian yang harus kami lahap karena studi kasus dan isu terkini yang harus kami selesaikan tidaklah sedikit. Saking seringnya kita berdiskusi, membuat kami semakin akrab bahkan hingga saat ini.

Di SBM-ITB, saya berkesempatan dapat bertemu dan menimba ilmu tidak hanya dari kalangan akademisi, tetapi juga dari kalangan profesional dan praktisi. Ditambah lagi, rekan-rekan sesama mahasiswa yang berasal dari beragam latar belakang memberikan banyak sudut pandang baru bagi saya pribadi. Dunia pemikiran saya yang selama ini banyak berkutat di dalam birokrasi, seakan terbawa untuk lebih membuka diri terhadap dinamika di dunia bisnis yang menurut saya bukan tidak mungkin diadaptasi di lingkungan pemerintahan. Sebagai contoh, tentang bagaimana pentingnya inovasi dan menjadi *agile* di dalam dunia bisnis. Sebuah perusahaan yang dulunya merupakan penguasa pasar, dapat dalam sekejap jatuh dan bangkrut hanya karena telat dalam berinovasi dan tidak *agile* dalam menjalankan bisnisnya. Sebut saja perusahaan-perusahaan seperti Nokia, Kodak, Blackberry, Toys “R” Us, dan lain sebagainya. Dan bukti pandemi juga mengajarkan kita bahwa perubahan harus dilakukan dengan cepat jika kita ingin *survive*. Dahulu mungkin kita berpikir sulit melakukan pekerjaan dan pendidikan secara *online*, tetapi pandemi ternyata membuka mata kita bahwa hal ini bukanlah hal yang tidak mungkin.

Di jaman yang serba cepat berubah saat ini, sudah saatnya bagi pemerintah, menurut saya, untuk juga berlaku inovatif dan *agile* dalam menjalankan proses bisnisnya agar tetap selalu bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Itulah alasan kenapa saya tertarik untuk mengadaptasi bagaimana perilaku dan *mindset* di dunia bisnis ke dalam dunia birokrasi. Di sisi lain, bersama 2

orang teman sesama FETA awardee, kami seakan-akan menjadi agen pemerintah di tengah-tengah calon eksekutif dan juga wirausahawan. Saya merasa senang dapat berbagi informasi dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah jika ada teman atau diskusi yang berkaitan mengenai kebijakan pemerintah dan birokrasi.

UNFORGETTABLE GLASGOW

Setelah menghabiskan waktu kurang lebih setahun di SBM-ITB, tiba saatnya untuk melanjutkan program *double degree* ke universitas *partner* yang berada di luar negeri. University of Glasgow menjadi pilihan saya. Saya mengambil jurusan *International Human Resources Management and Development* (IHRMD) di Adam Smith Business School (ASBS) University of Glasgow untuk mengembangkan pengetahuan yang komprehensif tentang manajemen dan pengembangan sumber daya manusia kontemporer. *"The most valuable asset of a 21st-century institution, whether business or non-business, will be its knowledge workers and their productivity"*, kata Peter Drucker. Didukung dengan alasan bahwa organisasi saya bekerja saat ini juga bergerak di bidang pengembangan SDM, membuat saya memutuskan mengambil jurusan ini.

Persiapan keberangkatan ke Glasgow menciptakan drama baru. Karena persiapan ini harus dilakukan ketika saya masih harus menyelesaikan perkuliahan di SBM – ITB. Hal ini tentu sedikit banyak mengganggu fokus saya karena konsentrasi yang terpecah antara harus bisa menyelesaikan perkuliahan di ITB dengan nilai sebaik mungkin, dan juga harus bisa menyiapkan perkuliahan di Glasgow supaya tetap sesuai jadwal. Ditambah kondisi pandemi yang belum terlihat ujungnya, membuat situasi menjadi semakin pelik. Kondisi pandemi membuat proses pembuatan visa memakan waktu yang lebih lama dari waktu normal sehingga keberangkatan saya ke Glasgow tertunda. Puncaknya, Indonesia sempat ditempatkan di *red list country* oleh pemerintah Inggris, sehingga membuat setiap kedatangan dari Indonesia diwajibkan untuk menjalani karantina selama 14 hari di lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Inggris.

Kesulitan-kesulitan tersebut, seakan terbayar ketika menyelesaikan karantina. Gedung kampus University of Glasgow dengan Cloisters-nya yang menawan, langit yang bersih, orang-orang yang ramah, membuat seakan-akan semua

perjuangan terbayar lunas. Perkuliahan yang dilakukan secara luring juga sangat menyenangkan bagi saya pribadi karena dapat merasakan langsung interaksi dan sensasi perkuliahan di dalam ruangan kelas di sebuah universitas di luar negeri. Pengalaman berkuliah di University of Glasgow juga memberikan pengalaman bersosialisasi dengan mahasiswa dari berbagai negara lainnya. Kami diharuskan bekerja secara berkelompok di beberapa kesempatan. Tentu saja, ketika berkumpul kami tidak melulu membicarakan tentang pelajaran, akan tetapi kami banyak bertukar cerita tentang bagaimana tempat kami berasal. Jika di SBM – ITB saya merasa seperti agen pemerintah yang masuk ke dalam ranah *private*, di University of Glasgow saya merasa sebagai agen negara Indonesia dalam menceritakan bagaimana indahnya negeri kita ini.

Teringat pesan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada saat awal kami lulus seleksi, bahwa kesempatan berkuliah di luar negeri adalah anugerah. Manfaatkan sebaik mungkin, mencari ilmu dan pengalaman di dalam dan di luar kampus. Berbekal pesan ini, saya berupaya mengikuti beberapa kegiatan di luar kelas. Salah satu yang berkesan adalah ketika saya memenangi lomba fotografi yang diadakan oleh kampus. Selain itu, saya juga menyempatkan untuk berjalan-jalan menikmati keindahan alam Skotlandia yang tentu saja tidak boleh dilewatkan.

KESULITAN ITU AKAN SELALU ADA, BEGITU JUGA KEMUDAHAN

Di awal-awal perkuliahan, saya sempat kesulitan karena perbedaan yang signifikan dari cara berpikir kritis yang sangat diutamakan dalam proses perkuliahan. Ditambah, saya sempat sakit dan membuat proses adaptasi tidak semulus yang diharapkan. Tetapi saya sadar, bahwa ini bagian dari perjuangan.

Menghabiskan sepanjang malam dan akhir pekan di perpustakaan menjadi hal yang biasa demi supaya saya dapat beradaptasi dan mengejar ketertinggalan.

"If knowledge is not put into practice, it does not benefit one."

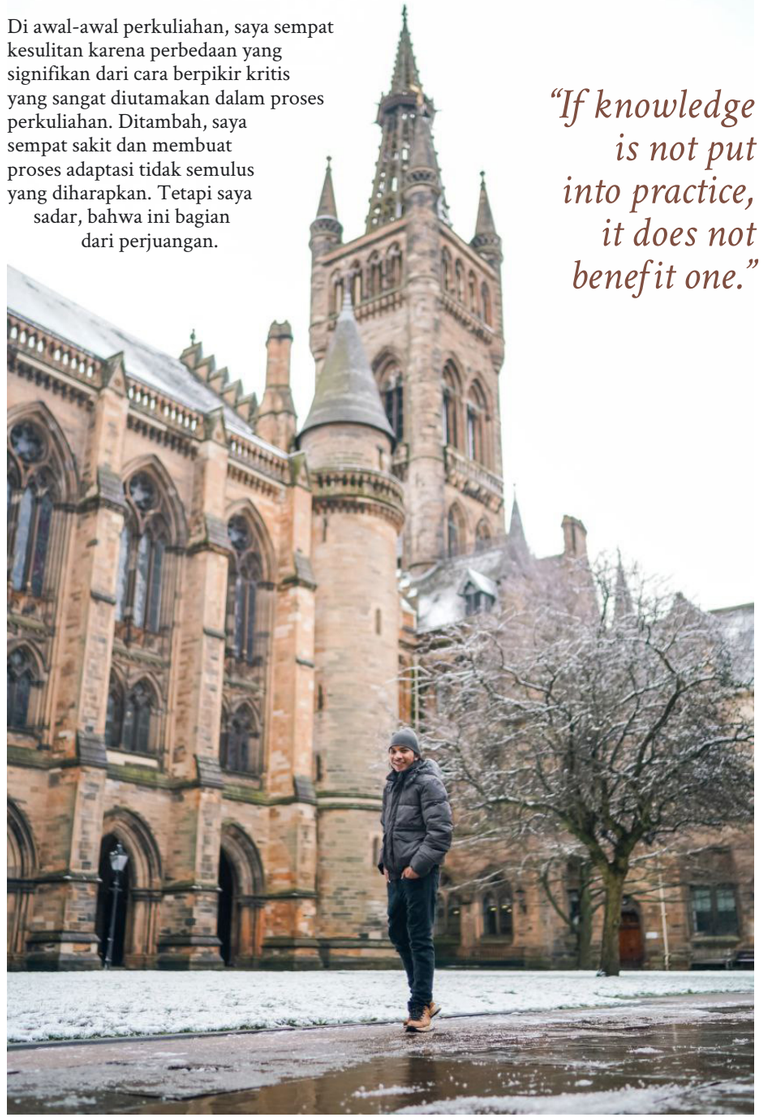

Ketika semua terasa semakin lancar, sebuah peristiwa kembali menghantam kenyamanan yang saya rasakan. Ayah saya, yang merupakan orang tua terakhir saya yang masih hidup saat itu, meninggal pada medio April 2022. Bertepatan saat saya dalam proses menyusun tugas akhir. Kendala biaya, jarak, serta waktu membuat saya tidak dapat mengantarkan ayah saya ke peristirahatan terakhirnya. Beruntung, saya memiliki keluarga yang selalu ada dan mendukung bahkan di saat tersulit sekalipun. Ditambah kepedulian pihak akademik kampus dan supervisor saya di University of Glasgow, yang sangat perhatian dan peduli pada kesehatan fisik dan mental saya selama menjalani masa-masa sulit tersebut. Hingga akhirnya kesulitan-kesulitan tersebut menjadi sebuah kisah memori indah. Kini, dua gelar master bukan lagi sekadar impian karena telah menjadi kenyataan.

Menurut saya pribadi, salah satu kelebihan dari perkuliahan *double degree* yang saya rasakan adalah adanya *privilege* untuk dapat langsung merasakan dan membandingkan perkuliahan di dalam dan di luar negeri, dengan tingkat strata yang sama dalam waktu yang tidak jauh berbeda. Bagi saya, masing-masing perkuliahan, baik di dalam maupun di luar negeri, memiliki kelebihannya masing-masing yang saling melengkapi sehingga saya merasa menjadi individu yang lebih komplet. Lulus bukanlah sebuah akhir, tapi adalah sebuah permulaan. Dan yang terpenting, semoga saya bisa selalu mengaplikasikan dan membagi pengetahuan serta pengalaman yang sudah saya dapat, karena seperti pepatah bijak berkata "*If knowledge is not put into practice, it does not benefit one.*"

#belajartanpabatas

TANYA TENTANG
BPPK DISINI

CALL CENTER HALO BPPK
14004

Atau bisa juga menghubungi:

Email Hubungi Kami:
bppk.hubungikami@kemenkeu.go.id

Hotline Chat Whatsapp
+62 081-1140-0144

bppk.kemenkeu.go.id

DWITA OKTAVANI SIREGAR

Back to Routine, Tips Bangkitkan Semangat Kerja Usai Libur Lebaran

Tidak terasa, periode libur lebaran yang dinanti telah tiba. Setelah melewati serangkaian libur panjang, kita harus kembali menjalani rutinitas seperti biasa, salah satunya bekerja. Bagi sebagian orang, kembali menjalani rutinitas setelah melewati periode tanpa melakukan pekerjaan terasa sedikit menakutkan. Ditambah dengan agenda mudik yang dilakukan, melewati perjalanan jauh dari kampung halaman ke kota tempat kita bekerja dapat terasa sangat melelahkan. Perubahan jam kerja yang berbeda dari bulan ramadan pun dapat menambah rasa malas untuk kembali menjalani aktivitas bekerja. Jika selama ramadan jam kerja lebih longgar, setelahnya jam kerja akan kembali normal.

Seorang ahli psikiatri, Dr. Angelos Halaris mengungkapkan bahwa setelah melewati libur panjang, kehilangan semangat dan susah berkonsentrasi di awal bekerja adalah hal normal yang sering terjadi di kalangan karyawan. Namun, apabila hal tersebut dibiarkan terus-menerus, produktivitas dan kinerja akan menurun yang berdampak pada kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, kita perlu mengantisipasinya dengan mengikuti beberapa tips dan trik berikut untuk membangkitkan kembali semangat kerja. Apa saja tips tersebut? Mari kita simak bersama.

STAY MOTIVATED

Menjaga semangat dan motivasi untuk bekerja setelah libur panjang menjadi hal penting yang perlu kita lakukan. Mulai dengan mencatat hal-hal penting apa yang membuat kita melakukan pekerjaan ini, baik hal yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang maupun tujuan karier yang ingin kita capai. Seorang psikolog anak dan keluarga, Samanta Elsener menyarankan kita untuk melakukan *self-talk* pada diri sendiri. Tanyakan pada diri sendiri untuk siapa dan apa tujuan kita bekerja. Tanamkan pada pikiran untuk fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan begitu kita akan memacu diri untuk bekerja lebih termotivasi dan semangat dalam bekerja.

MENYUSUN RENCANA PEKERJAAN

Setelah menikmati libur panjang, kembali menjalani rutinitas bekerja akan terasa sedikit membingungkan dan kehilangan semangat menjalankan tugas-tugas yang menumpuk. Akibatnya, pekerjaan pun jadi terbengkalai dan tidak terselesaikan dengan baik.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi kita untuk membuat rencana kerja yang jelas dan terstruktur. Dengan merencanakan aktivitas dan menyusun target yang ingin dicapai, hal tersebut dapat membantu kita untuk lebih fokus, produktif, dan efisien dalam menjalankan pekerjaan. Tidak hanya menyusun rencana pekerjaan, membuat daftar tugas atau *to-do list* juga akan sangat membantu menjalani pekerjaan. Melalui daftar tersebut, kita dapat melihat tugas apa saja yang harus dikerjakan dan diprioritaskan. Kita dapat menyelesaikan tugas paling penting dan mendesak terlebih dahulu.

Dilansir dari sebuah artikel yang diunggah oleh Bradford University, Steele seorang peneliti dari School of Management menyebutkan bahwa penyusunan rencana melalui penulisan *to-do list* merupakan sebuah konsep sederhana yang dapat membantu individu untuk lebih terorganisir, membantu mengidentifikasi beberapa hal penting, alasan mengapa kita melakukannya, *timeline* untuk menyelesaikannya, membantu diri sendiri untuk mengontrol tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan menghindari kita dari kebiasaan menunda pekerjaan.

MENGATUR *WORKSPACE*

Membangkitkan semangat bekerja juga dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal sederhana, seperti mengatur meja kerja. Bagi sebagian orang, kondisi meja kerja yang berantakan dapat menjadi masalah serius. Ketika meja kerja terlihat berantakan, kita cenderung akan merasa sulit berkonsentrasi saat bekerja. Pasalnya, meja kerja yang berantakan akan menyebabkan kita kesulitan untuk mengatur dan mencari barang-barang yang dibutuhkan.

Tidak hanya itu, sebuah studi di Princeton University menyebutkan bahwa semakin banyak benda yang berantakan di atas meja dapat menyebabkan kita kesulitan berkonsentrasi dan membuat semangat kerja menurun. Oleh karena itu, merapikan meja kerja menjadi suatu tindakan penting yang dilakukan saat memulai kembali rutinitas bekerja setelah libur panjang. Ketika tiba di kantor, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah memilih posisi ternyaman dan memilih meja yang diinginkan. Rapikan meja yang kita pilih dan atur posisi barang dengan sebaik mungkin. Tidak hanya itu, sebaiknya hindari menumpuk barang terlalu banyak di atas meja. Kita dapat menggunakan loker untuk menyimpan barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan saat bekerja.

BERSOSIALISASI DENGAN REKAN KERJA

Melanjutkan tips sebelumnya, hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah tetap terhubung dengan dunia sosial, seperti bersosialisasi dengan sesama rekan kerja. Membangun hubungan yang baik dengan sesama karyawan dapat membangkitkan semangat menjalani aktivitas pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan kepercayaan diri. Sebuah survei yang dilakukan oleh Glints mengungkapkan bahwa rekan kerja dapat memengaruhi semangat dan motivasi diri untuk berkembang dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.

Usai melaksanakan libur panjang, kita dapat memulai hari dengan menyapa rekan kerja. Menanyakan kabar masing-masing dan saling bertukar cerita mengenai pengalaman liburan. Selain itu, bersosialisasi dengan rekan kerja juga dapat mengurangi stres yang disebabkan

oleh tumpukan pekerjaan. Lakukan diskusi terkait pekerjaan yang dilakukan dengan saling berbagi saran dan *feedback* terkait pekerjaan satu dengan yang lainnya.

MEMBERI WAKTU ISTIRAHAT PADA DIRI SENDIRI

Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah libur panjang akan ada banyak pekerjaan menumpuk yang menanti. Sebaiknya, jangan langsung memaksakan diri untuk menuntaskan semua tugas dan pekerjaan sekaligus. Kita perlu menyesuaikan kembali ritme bekerja agar tubuh tidak kaget dan semangat tetap terjaga. Berikan waktu istirahat pada diri sendiri di sela-sela jam kerja. Kita juga dapat mulai mencicil pekerjaan mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Memaksakan diri untuk menyelesaikan semua pekerjaan sekaligus justru akan membuat kita merasa jenuh, kehilangan semangat, dan semakin merindukan masa liburan.

STAY POSITIVE

Dalam sebuah buku berjudul "The Power of Mind" karya Arunda, terdapat sebuah kutipan yang mengatakan bahwa pikiran manusia dan alam saling terhubung satu sama lain. Hal ini berarti bahwa energi positif atau negatif yang berada di pikiran manusia akan menarik energi yang berasal dari luar untuk ikut masuk ke dalam pikirannya. Oleh karena itu, menjaga pikiran tetap positif sangatlah penting. Ketika kembali melakukan rutinitas kerja, kita dapat mengisi pikiran dengan hal-hal positif agar dapat fokus menjalani rutinitas. Perlu di ingat bahwa apa yang kita pikirkan akan memengaruhi kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Dengan menjaga pola pikir tetap positif dan optimis dalam bekerja membuat semangat tetap terjaga sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi lebih mudah.

Nah, itulah beberapa tips yang dapat kita terapkan untuk membangkitkan kembali semangat kerja usai libur lebaran. Jadikan momen liburan sebagai waktu untuk menyegarkan diri dan menghadapi pekerjaan dengan semangat baru. *Stay healthy and keep the spirit!*

"Tanamkan pada pikiran untuk fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan begitu kita akan memacu diri untuk bekerja lebih termotivasi dan semangat dalam bekerja."

DWITA OKTAVANI SIREGAR

MUSIM PANCAROBA: ANTISIPASI DAMPAK BURUK PADA KESEHATAN DAN PRODUKTIVITAS

"Perubahan cuaca secara drastis dapat memengaruhi kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, perubahan cuaca dapat memengaruhi kesehatan manusia akibat adanya perubahan suhu, kelembapan udara, temperatur, dan lain sebagainya."

Pernahkah kamu mengalami situasi dimana pagi yang sangat panas dan terik, lalu hujan deras beserta angin kencang di sore harinya? *Yup!* Fenomena tersebut dikenal dengan istilah pancaroba. Fenomena ini biasanya terjadi saat memasuki pertengahan tahun, di mana terjadi perubahan cuaca yang drastis akibat adanya peralihan cuaca dari satu musim ke musim lainnya, misalnya dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya.

Perubahan cuaca yang drastis memang bisa membuat aktivitas sehari-hari kita menjadi sedikit terganggu, terutama bagi kita yang harus pergi bekerja ke kantor setiap hari, apalagi jika kegiatan kantor yang mengharuskan kita keluar kota. Saat musim pancaroba tiba, perubahan cuaca yang terjadi akan menyebabkan perubahan suhu dan kelembapan udara. Tubuh kita kemudian harus beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan suhu yang tidak menentu. Kondisi ini perlu kita waspadai dan antisipasi dengan benar karena perubahan suhu secara drastis dan tiba-tiba akan menyebabkan tubuh rentan terkena penyakit dan memicu munculnya masalah kesehatan lainnya.

Seorang peneliti bernama Susilawati pada jurnalnya *Scientific of Environmental Health and Diseases* mengungkapkan bahwa perubahan cuaca secara drastis dapat memengaruhi kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, perubahan cuaca dapat memengaruhi kesehatan manusia akibat adanya perubahan suhu, kelembapan udara, temperatur, dan lain sebagainya. Tak jarang akibat adanya perubahan cuaca yang drastis dapat menyebabkan kita rentan terserang penyakit seperti flu, sakit kepala, demam, hingga risiko terkena penyakit seperti demam berdarah hingga infeksi saluran pernapasan. Sementara itu, dampak secara tidak langsung memengaruhi faktor lingkungan seperti kualitas air, kualitas udara, penurunan sumber daya air, dan lainnya yang dapat memengaruhi kesehatan manusia.

Siapa sangka, perubahan cuaca yang tidak stabil dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada kesehatan dan menghambat aktivitas sehari-hari kita. Tentunya, kita tidak ingin terpaksa mengambil cuti hanya karena kurang sehat atau sakit. Hal tersebut kemudian akan mengganggu produktivitas dan menurunkan kinerja kerja. Maka dari itu, perlu adanya tindakan antisipasi untuk mencegah diri terhindar dari berbagai penyakit serta meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh. Menurut Septianto, seorang peneliti yang dalam jurnal pengabdiannya menyebutkan bahwa peningkatan imunitas dan daya tahan tubuh dapat dimulai dengan mulai melakukan penerapan pola hidup sehat untuk mencegah diri dari penyakit. Dilansir dari Kementerian Kesehatan, terdapat beberapa rangkaian pencegahan yang dapat dilakukan. Apa saja? Berikut tipsnya!

MENINGKATKAN ASUPAN NUTRISI PADA MAKANAN DAN MINUMAN

Makanan dan minuman merupakan faktor penting bagi kesehatan manusia. Asupan makanan yang sehat akan memberikan tambahan energi dan tenaga bagi manusia. Menjaga pola makan menjadi salah satu cara bagi kita untuk mempertahankan kesehatan, memenuhi kebutuhan nutrisi, dan mencegah risiko penyakit. Bagi pekerja kantor, menjaga pola makan perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Berdasarkan dari studi yang dilakukan oleh Agung dalam jurnalnya *Social Science*, keadaan kurang gizi dapat menghambat aktivitas dan menurunkan produktivitas kerja. Hal ini terjadi karena kemampuan seseorang bekerja dipengaruhi oleh jumlah energi yang diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Ditambah lagi, dengan kondisi perubahan cuaca yang tak menentu, asupan nutrisi pada tubuh perlu ditingkatkan agar tubuh tetap optimal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Asupan nutrisi yang cukup berperan meningkatkan ketahanan fisik dan produktivitas kerja. Pemenuhan asupan makanan dapat dilakukan dengan mengikuti anjuran "Isi Piringku" yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, seperti meningkatkan konsumsi zat besi, mineral, dan protein. Selain itu, penting juga bagi kita untuk memperhatikan asupan cairan dengan meningkatkan konsumsi air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik.

MENJAGA KELEMBAPAN UDARA DAN VENTILASI

Kualitas udara dapat memengaruhi kesehatan manusia. Oleh karena itu, menjaga kelembapan udara dan ventilasi menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, terutama bagi kita yang menghabiskan banyak waktu di dalam ruangan, seperti di kantor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat, gangguan kesehatan pada pekerja dapat dipengaruhi oleh kualitas udara di dalam ruangan. Untuk itu, kelembapan dan ventilasi udara harus dijaga dengan baik, terutama pada musim pancaroba seperti ini. Ruangan yang terlalu kering akan menyebabkan gangguan pada kulit hingga tenggorokan. Sebaliknya udara yang terlalu lembap akan meningkatkan risiko munculnya jamur dan bakteri. Kelembapan biasanya bersumber dari air hujan, genangan air hingga pengatur udara atau pendingin. Sementara itu, ventilasi meliputi kondisi sirkulasi udara yang keluar dan masuk dari ruangan. Saat musim pancaroba, menjaga kelembapan udara dan ventilasi dapat dilakukan dengan penggunaan *humidifier*, membersihkan *air conditioner* secara berkala, dan mengatur suhu ruangan dengan tetap memperhatikan cuaca.

MENJAGA KEBERSIHAN DAN KESTERILAN LINGKUNGAN

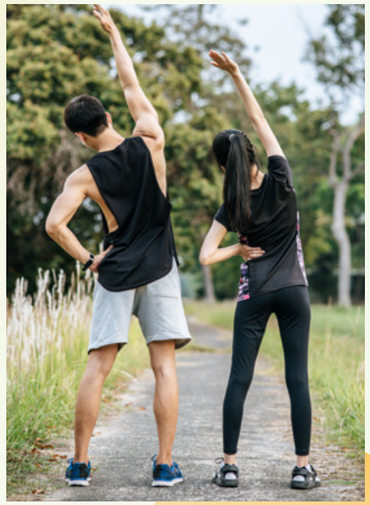

Selama musim pancaroba, menjaga kebersihan dan kesterilan lingkungan harus tetap dilakukan. Tingginya intensitas curah hujan yang dapat terjadi selama peralihan musim dapat meningkatkan genangan air di lingkungan. Air yang tergenang berpotensi menjadi sarang perkembangbiakan nyamuk dan berbagai kuman penyebab penyakit lainnya. Untuk mencegah hal tersebut, kita harus memastikan selokan atau parit di sekitar lingkungan rumah dan kantor tidak tersumbat dan tergenang air. Lakukan pembersihan secara berkala pada area rumah dan lingkungan dengan memperhatikan atap, jendela, dan sudut-sudut ruangan yang berpotensi terkena air hujan. Selain itu, kita juga tidak membiarkan sampah lama bertumpuk. Kita juga harus senantiasa menjaga kebersihan diri dan makanan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir baik sebelum dan sesudah makan.

MEMAKAI PAKAIAN SESUAI CUACA DAN SEDIA PAYUNG

Perubahan cuaca yang tidak menentu akibat musim pancaroba menyebabkan kita harus selalu siaga. Karena cuaca dapat berubah dengan cepat, kita harus senantiasa membawa payung atau mantel bila hendak bepergian. Bagi kita yang berkendara dengan sepeda motor atau menggunakan kendaraan umum, sebaiknya menggunakan pakaian hangat seperti jaket atau *hoodie* untuk melindungi tubuh dari paparan cuaca.

MELAKUKAN AKTIVITAS FISIK

Tidak dapat dipungkiri bahwa tubuh yang bugar dapat membantu kita menghindari berbagai penyakit, terutama di tengah musim pancaroba seperti ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga fungsi tubuh dengan baik, salah satunya adalah dengan rutin melakukan aktivitas fisik. Meskipun terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba, hal itu tidak menjadi alasan untuk tidak berolahraga. Ketika cuaca sedang baik, kita dapat melakukan aktivitas fisik seperti joging atau bersepeda. Sebaliknya, ketika cuaca sedang hujan, kita tetap dapat melakukan olahraga di dalam rumah dengan melakukan latihan kardio atau angkat beban.

Demikianlah tips yang bisa kita ikuti untuk mengantisipasi dampak buruk pada kesehatan selama musim pancaroba. Jangan biarkan cuaca menjadi penghalang untuk kita tetap produktif selama bekerja. Mari jaga kesehatan selama musim pancaroba bersama. Yuk terapkan!

ARTIKEL & FOTO: DEMAYA NOOR HASANAH

Melompat Waktu ke Malang Tempo Dulu: Heritage Kayutangan

Berwisata tak lengkap jika tidak mengulik tempat unik yang ada saat kita berkunjung seperti halnya tempat yang berada di Kota Malang yang satu ini. Sering disebut dengan Kampoeng Heritage Kajoetangan, wisata yang menyuguhkan napak tilas sejarah adanya kawasan Kayutangan yang memilki deretan bangunan arsitektur kolonial Belanda yang khas dan masih terjaga keasliannya.

Daerah Kayutangan dulunya merupakan kawasan perdagangan dan bisnis yang dibuat oleh pemerintahan Belanda. Menurut Sejarawan Universitas Negeri Malang, Reza Hudiyanto, Belanda mengonsep Kayutangan layaknya kota di Eropa dengan ciri khas unik yaitu jarak antara etalase toko dengan jalan di Kayutangan cukup dekat dengan maksud sebagai Kawasan perdagangan yang berfokus untuk mengakomodasi kaum borjuis dan saudagar kaya asal Eropa.

Berbagai bangunan kolonial di sepanjang Jalan Kayutangan yang saat ini berubah nama menjadi Jalan Basuki Rahmat ini berkembang menjadi kawasan pertokoan yang strategis di era Tahun 1960-1970an. Apalagi jalan Kayutangan ini mengarah pada alun-alun Kota Malang dan menjadikan lokasi ini cukup penting bagi bisnis dan pusat niaga.

Selain bentuk pertokoan yang unik, saat kita menuju ujung jalan Kayutangan menuju alun-alun terdapat bangunan yang terjaga keasliannya salah satunya adalah Toko Oen. Resto ini menjual menu es krim, patiseri, dan menu-menu lainnya dengan nuansa tempo dulu ala era Kolonial bahkan interior dari jendela hingga lantai pun tegelnya semua masih asli. Selain itu juga ada Gereja Katolik Hati Kudus Yesus yang populer dikenal dengan Gereja Kayutangan yang mempunyai dua menara menjulang bergaya arsitektur gotik yang mempunyai nilai sejarah. Gereja yang saat ini usianya mencapai 114 tahun masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat Katolik.

Setelah ditetapkan sebagai kawasan warisan budaya (*heritage*) pada tahun 2019, kawasan ini mulai dikembangkan dan berbenah menjadi daya tarik yang memperkuat sektor ekonomi kreatif yang sedang digenjot oleh Pemerintah Kota Malang. Kawasan yang dulu terkesan kumuh ini telah berubah dan terlihat rapi dan tertata dengan nuansa masa kolonial disertai *spot* foto yang menarik. Penyesuaian yang dilakukan antara lain merapikan dua bundaran (PLN dan Rajabally) yang dulunya jalan beraspal berubah mejadi batu andesit yang menambah konsep heritage. Deretan lampu-lampu bernuansa klasik yang terpasang di sepanjang jalan pun menjadi penanda bahwa kawasan *heritage* Kayutangan ini tengah berbenah. Selain itu area trotoar (pedestrian) di sepanjang jalan dilengkapi dengan kursi-kursi cantik dengan pegangan besi dan berlandaskan kayu sehingga terkesan kuno menambah indahnya jalan Kayutangan. Penataan Kampoeng Heritage ini diharapkan dapat membantu pelestarian cagar budaya sekaligus sebagai penggerak perekonomian masyarakat setempat dengan menjelma sebagai objek wisata baru di Kota Malang.

Lalu apa saja yang bisa dilakukan di Kampoeng Heritage KayoeTangan kini?

TEMPAT *HEALING* SUASANA TEMPO DULU

Setelah digagas sebagai tempat wisata tempoe dulu (heritage), koridor Kayutangan yang berada mulai kembali menggeliat dan menarik minat wisatawan yang fokus utamanya untuk bernostalgia dengan suasaan tempo dulu sekaligus mengenalkan sejarah. pengunjung bisa mempelajari jejak sejarah masa kolonial di kawasan ini.

Sambil mengenang sejarah, pelancong disuguhkan suasana syahdu nan cantik jalanan yang dihiasi lampu-lampu klasik. Apalagi jika dinikmati saat menjelang sore hari, cahaya kuning yang memancar dari lampu tampak berkejaran dengan cahaya matahari yang mulai meredup. Pergantian sore ke malam hari menjadi waktu wajib untuk berkunjung ke Kayutangan untuk melepas penat serta menikmati suasana tempo dulu.

Selain disuguhkan dengan jalanan nan elok dan bersejarah, pada beberapa bangunan yang khususnya masih asli terdapat plakat khusus berisi informasi sejarah singkat tempat tersebut. Contohnya, Rumah 1870 yang disebut sebagai rumah tertua di wilayah Kayutangan. Menurut informasi yang tertera dalam plakat, bangunan ini masih utuh atau orisinal dari awal pembangunan hingga sekarang dengan ciri loteng beratap perisai. Menyusuri Kampoeng Heritage Kajoetangan, bangunan bergaya kolonial sejak 1870, ada beberapa peninggalan tua lainnya seperti rumah Mbah Ndut, rumah Jengki, rumah Jamu, hingga makam Eyang Honggo Kusumo.

TEMPAT FOTO DAN WISATA KREATIF MASYARAKAT

Tempat nan cantik ini tak bisa rasanya apabila tidak diabadikan dengan foto-foto selfie dan tempat yang tepat untuk berburu foto retro maupun video untuk dijadikan bahan konten. Berbagai sudut tempat menjadi primadona para wisata untuk berfoto sambil berdiri berlatar belakang gedung maupun duduk di kursi-kursi klasik yang terpasang di sepanjang trotoar. Tidak kalah menarik, aktivitas mengikuti kegiatan seni dan budaya dapat dilihat pada waktu/jadwal tertentu. Jadwalnya pun bisa dilihat dalam informasi pagelaran yang dipapang di pinggir jalan Kayutangan. Sesuai dengan temanya yang mengusung konsep tempo dulu, kegiatan yang diadakan di Kampoeng Heritage Kajoetangan banyak memasukkan unsur seni dan budaya sejarah lama.

Tak hanya itu, berbagai pertunjukan musik kerap kali digelar pada sejumlah titik juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Seperti halnya yang dilihat pada sore hari (7/4), tampak musisi jalanan mendendangkan lagu-lagu jawa kontemporer disuguhkan oleh para pelancong yang sedang belalu lalang di sekitar jalan. Tidak hanya lagu jawa, beberapa musisi juga mendedangkan lagu-lagu modern khas anak muda semakin malam acarapun menjadi semakin ramai oleh masyarakat sambil menimati malam Kota Malang kala itu.

TEMPAT HANGOUT DISETAI DENGAN KAFE UNIK SUASANA TEMPO DULU

Toko-toko yang telah lama berjibaku untuk bertahan sebelumnya, kini berubah menjadi sejumlah kafe yang menawarkan

wisata kuliner untuk wisatawan. Tidak hanya kafe, beberapa tempat dihiasi dengan kedai kopi dan restoran kecil yang tepat berada di jantung kawasan permukiman. Usaha yang muncul di Kampung Heritage Kayutangan ini kebanyakan merupakan usaha rumahan yang dikelola pemilik rumah. Keberadaan kafe/ kedai dan restoran tersebut, kini mulai melengkapi kawasan Kayutangan sebagai objek wisata baru dan menjadi potensi usaha bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kota Malang.

Namun, beberapa spot memang masih belum maksimal digunakan untuk usaha kuliner yang diharapkan oleh pemerintah (beberapa toko masih tutup). Selain itu, sejumlah kafe itu memang tidak seperti kafe pada umumnya yang memiliki meja dan kursi dalam jumlah besar untuk pelanggan namun hanya dapat menampung palanggan dalam jumlah kecil. Walaupun hal ini masih bisa dikembangkan potensinya dengan berbagai pengembangan dan rencana optimalisasi kegiatan yang lebih memperkenalkan potensi Kampung Heritage Kayutangan.

Kedepannya jalanan Kayutangan akan lebih berkembang, saat ini telah dikembangkan rekayasa lalu lintas satu arah untuk dapat membuat kawasan ini lebih lega dan tidak penuh dengan kendaraan yang berlalu lalang. Apalagi telah rampungnya penggarapan zona 3 dekat tugu Chairil Anwar dan gereja yang telah rampung penggarapannya, maka Kawasan ini akan akan lebih mengeliat sebagai objek wisata notalgia bagi para pelancong yang datang ke Kota Malang.

Daya Tarik Kampoeng Heritage Kayoetangan mulai dari menyusuri bangunan-bangunan berusia ratusan tahun, mengambil foto cantik dan klasik, hingga menikmati kuliner legendaris bernuasa jadul layaknya melompat waktu ke malang tempo dulu.

POINT OF INTEREST

"Daya Tarik Kampoeng Heritage Kayoetangan mulai dari menyusuri bangunan-bangunan berusia ratusan tahun, mengambil foto cantik dan klasik, hingga menikmati kuliner legendaris bernuasa jadul layaknya melompat waktu ke malang tempo dulu."

Judul:
Mengompos di Rumah itu Mudah

Jumlah halaman:
viii + 122 halaman

Penerbit:
Halaman Moeka Publishing

Cetakan pertama:
Juli 2020

ISBN:
978-602-269-391-8

DEWI PRABAWATI SETYANINGTYAS

Resensi

Menyayangi Bumi, Mulai Dari Diri

Program ramah lingkungan saat ini sedang ramai dibicarakan. Di Kementerian Keuangan sendiri sudah terbit Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.1/2019 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Program *Eco-Office*) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Namun, pernahkah pembaca terpikir untuk menerapkan program ramah lingkungan di rumah?

DK Wardhani, penulis yang juga alumni Institut Teknologi Bandung dan pemerhati lingkungan, mengajak kita menyayangi bumi mulai dari rumah dengan mengompos melalui buku "Mengompos di Rumah itu Mudah".

Sebelum masuk ke seluk beluk mengompos, pembaca diajak merenungkan alasan terkuat kita untuk mengompos. Apakah karena hobi? Apakah karena kita mempunyai banyak waktu luang? Atau karena kita seorang sarjana pertanian?

MULAI DARI MASALAH

DK Wardhani atau akrab dipanggil Dini, mencoba membuka cakrawala kita mengenai permasalahan sampah di Indonesia melalui data. Ternyata, sebagian besar komposisi sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Selain itu, permasalahan sampah juga berasal dari faktor internal, yakni rasa takut dan berbagai alasan untuk tidak bertindak.

Dengan memahami sudut pandang pembaca yang kesulitan memulai mengatasi permasalahan sampah di rumah, Dini memberikan berbagai alternatif untuk memperpanjang usia sampah, atau dalam buku ini disebut sisa konsumsi organik. Sisa konsumsi yang biasanya terbuang dapat kita olah dengan sederhana dan lebih bermanfaat.

TAK KENAL, MAKA KENALAN

Tak hanya berbicara tentang sisa konsumsi organik, Dini berusaha mengenalkan berbagai jenis sampah atau sisa konsumsi yang biasa dihasilkan di rumah tangga, seperti berbagai jenis plastik, kertas, kaca, logam, sampah elektronik, dan sampah medis. Tak hanya mengenalkan jenis-jenisnya, Dini juga membagikan alternatif penanganan sampah-sampah ini.

Dalam menyajikan materinya tentang kompos, Dini juga memulai dengan pengenalan kompos mulai dari proses yang terjadi dalam mengompos, metode, juga prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengompos. Berbagai metode yang dibahas dalam buku ini disajikan secara komprehensif, mulai dari persiapan hingga panen, termasuk karakteristik dari masing-masing metode.

SEDERHANA

Tidak terlalu banyak tulisan kaku dalam buku ini. Berbagai gambar, grafik, dan kutipan justru sangat mendominasi. Bagi pembaca yang menyukai visualisasi, buku ini sangat menarik dan memberi gambaran lebih jelas mengenai jenis-jenis sampah dan metode mengompos. Penyajian yang sederhana juga membuat buku ini mudah untuk dipahami.

Selain penyajiannya yang sederhana, Dini juga memberikan pengenalan mengenai karakteristik berbagai metode mengompos, juga kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian, para pembaca dapat menentukan sendiri metode apa yang paling memungkinkan untuk diaplikasikan dalam rumah tangga masing-masing. Di samping itu, alat-alat yang disampaikan dalam kegiatan mengompos di buku ini mudah ditemui di sekitar kita dan bahkan dari pemanfaatan sampah atau sisa konsumsi lain.

MENJAWAB BERBAGAI PERTANYAAN

Buku ini juga dilengkapi dengan bab khusus "*Frequently Ask Question* (FAQ)" yang menjawab berbagai pertanyaan dan permasalahan yang sering muncul dalam diskusi mengenai kegiatan mengompos. FAQ ini juga dapat menjadi tambahan informasi untuk mempertimbangkan metode mengompos yang akan kita gunakan. Berbagai mitos mengenai mengompos juga disajikan dengan baik dalam buku ini.

Di akhir bukunya, Dini membagikan juga mengenai pembuatan biopori yang telah dia praktikkan. Skema detail biopori juga tergambar jelas sehingga memudahkan pembaca untuk mengaplikasikan di rumah. Berbagai kiat dan permasalahan seputar biopori juga disampaikan secara singkat tetapi tetap informatif.

MENINGKATKAN KEINGINAN MENGOMPOS

Buku ini berhasil mengikis keraguan untuk mulai mengompos di rumah. Berbagai mitos dan alasan yang menghalangi, seperti kendala luas lahan, bau tidak sedap, dan belatung yang menjijikkan ditepis dengan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami.

Alat-alat yang digunakan dalam metode mengompos yang dikenalkan oleh Dini dalam buku ini juga sederhana dan mudah didapat. Seluruh proses mengompos dapat dilakukan dalam skala rumah tangga tanpa perlu membeli bahan-bahan kimia tambahan.

Bagi pembaca yang memang belum pernah mengompos atau pernah gagal dalam mengompos, buku ini sangat cocok untuk dibaca. Buku ini juga tidak terlalu tebal, tak perlu waktu terlalu lama untuk menyelesaikannya.

Buku ini akan lebih menarik seandainya dibuat dalam versi berwarna. Ilustrasi di dalamnya akan lebih menarik dan membuat pembaca lebih bersemangat dengan warna-warna yang tepat.

AYO KITA MULAI!

Sebagaimana yang telah disajikan pada awal buku ini, komposisi sampah di Indonesia didominasi sampah organik yang sebagian besar berasal dari rumah tangga. Hal ini tentunya dapat ditangani dengan adanya kesadarkan bersama untuk mulai mengelola sampah dari skala rumah tangga.

Dengan membaca dan memahami buku ini, para pembaca diharapkan lebih peduli pada lingkungan dan tidak takut untuk memulai aksi untuk menyayangi bumi. Kita dapat memulai dari memilah sampah yang kita hasilkan. Sampah organik dapat kita olah dengan memanfaatkannya menjadi produk lain, misal kaldu dari sisa kulit udang. Sementara itu, sampah nonorganik dapat kita manfaatkan untuk media mengompos, dipakai ulang, maupun dikirimkan ke bank sampah atau pengelola sampah yang sesuai.

Mari kita bayangkan, jika setiap rumah tangga mulai sadar dan peduli dengan sampah yang dihasilkannya serta mulai mengelola sampah yang dihasilkan, maka permasalahan sampah di negeri ini bisa lebih mudah ditangani. Risiko pencemaran tanah, sungai, dan laut akibat sampah yang tidak diolah dengan baik juga akan berkurang. Kita bahkan tidak perlu khawatir tempat pembuangan akhir akan kelebihan kapasitas karena sisa konsumsi yang dibawa ke TPA dapat diminimalisir.

Tentunya, hal ini tidak dapat kita lakukan tanpa adanya niat, kesadaran, dan alasan yang kuat. Temukan alasan kita, perkuat niat kita, dan tumbuhkan kesadarkan kita untuk menyayangi bumi dari diri kita sendiri. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan membaca buku ini.

"Saatnya membuktikan bahwa mengompos itu benar-benar mudah dan menyenangkan!"
-DK Wardhani-

Galeri Magelang

FOTO:
ADAM ARAFAT

MASJID AGUNG MAGELANG

Masjid Agung di Kota Magelang yang didirikan KH Mudakir dan memiliki gaya arsitektur perpaduan antara Belanda dan Arab ini ternyata sudah berumur 242 tahun.

MENARA AIR PENINGGALAN VOC

Tahukah kamu kalau menara air yang berada di Alun Alun Kota Magelang sudah berusia 100 tahun? Hebatnya lagi bangunan ini belum pernah mengalami renovasi apapun. Menara Air yang menjadi landmark Kota Magelang ini dirancang oleh seorang Arsitek berkebangsaan Belanda yang bernama Thomas Kharsten.

KLENTENG LIONG HO

Klenteng yang didirikan oleh Kapitein Be Koen Wie (Tjok Lok) pada tahun 1864 ini menjadi saksi perjuangan masyarakat Tionghoa yang ikut serta melawan penjajah Belanda dalam perang Jawa, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro.

BOROBUDUR

Candi Borobudur terletak di Magelang, tepatnya di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah. Di dalam Candi Borobudur, terdapat 2.672 panel. Ansambel reliefnya paling lengkap di dunia dan tidak ada yang menandingi nilai seninya. Pada tahun 1991 UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai salah satu warisan dunia.

KAWASAN PECINAN MAGELANG

Kawasan Pecinan menjadi area utama hunian warga keturunan Tionghoa yang juga pusat perekonomian kota, dan masih banyak bangunan yang tetap mempertahankan gaya arsitektur awal 1900-an.

ISSN: 2086-4833